

DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

(PERIODE 2010-2017)

DETERMINANTS POVERTY IN CENTRAL JAVA PROVINCE

(PERIOD 2010-2017)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ilmu Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Oleh :

RAHMI LUMANTARI

20150430343

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

SKRIPSI

**DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH
(PERIODE 2010-2017)**

***DETERMINANTS POVERTY IN CENTRAL JAVA PROVINCE
(PERIOD 2010-2017)***

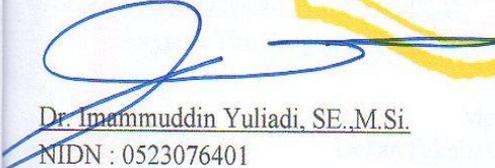
Diajukan Oleh

RAHMI LUMANTARI

20150430343



Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing,


Dr. Imammuddin Yuliadi, SE.,M.Si.
NIDN : 0523076401

Tanggal, 25 Februari 2019

SKRIPSI

DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

(PERIODE 2010-2017)

DETERMINANTS POVERTY IN CENTRAL JAVA PROVINCE

(PERIOD 2010-2017)

Diajukan Oleh

RAHMI LUMANTARI

20150430343

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji Program Studi Ilmu
Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tanggal 13 Maret 2019

Yang terdiri dari

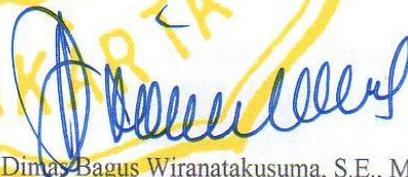
Dr. Imamuddin Yuliadi, SE., M.Si.

Ketua Tim Penguji



Diah Setyowati Dewanti, SE., M.Si., Ph.D.

Anggota Tim Penguji



Dimas Bagus Wiranatakusuma, S.E., M.Ec., Ph.D.

Anggota Tim Penguji

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Rizal Yava, SE., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.

NIK. 19731218199904 143 068

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Rahmi Lumantari

Nomor Mahasiswa : 20150430343

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul : **“DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH (PERIODE 2010-2017)** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.

Yogyakarta, 25 Februari 2019



Rahmi Lumantari

MOTTO

Stay connected to Allah SWT

(Selalu terhubung dengan Allah SWT)

No limit gon touch the sky

(Tidak ada batas menyentuh langit)

Hiduplah seakan kamu akan mati besok.

Belajarlh seakan kamu akan hidup selamanya.

–Mahatma Gandhi–

PERSEMBAHAN

Persembahan yang pertama dan utama untuk keluargaku, Bapak dan Ibu terimakasih sudah selalu mendukung aku dalam keadaan apapun, terimakasih untuk semua doa-doa kalian. Untuk kakak-kakak aku Mba Yudhi dan Mba Nia terimakasih karena selalu kasih aku semangat. Kalian *support system* terbaik!

Terima kasih untuk sahabat-sahabat Jamet aku, Dinda, Devi dan Febi yang selalu kasih semangat dan dukungan terbaik kalian. Terima kasih sudah mau jadi teman aku selama di Jogja. *Love y'all!*

Kepada temanku sekaligus mentor terbaik yang pernah ada Dian Pristi Wardani yang selalu membimbing aku dan kasih aku semangat. *You are the best mentor in the world!*

Dan terimakasih kepada semua teman-temanku yang telah memberi dukungan dan semangatnya. Terimakasih!

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan kemiskian. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Harapan Hidup (AHH). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan bantuan software Eviews 8. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini diperlukan penambahan variabel independen guna memperkuat hasil penelitian.

Kata kunci : Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, Angka Harapan Hidup

ABSTRACT

This study aims to analyze the Determinants of Poverty in Central Java Province 2010-2017. The dependent variable in this study is poverty. The independent variables in this study are Population, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Hope Expectation Rate (AHH). The data used in this study are secondary data obtained from the Central Java Provincial Statistics Agency. The analytical tool used is a panel data regression model with the help of software Eviews 8. Based on the results of the analysis that has been done the results show that the Population Amount, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Hope Expectation Rate variables have a negative and significant effect on Poverty in Province of Central Java. In this study it is necessary to add independent variables to strengthen the result of the study.

Keywords: Poverty, Population Amount, Gross Regional Domestic Product, Hope Expectation Rate

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “*Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah (Periode 2010-2017)*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Skripsi ini dapat selesai dengan baik tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan pihak-pihak terkait, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Bapak Imamudin Yuliadi selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan kelonggaran waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan kemudahan yang diberikan selama menyelesaikan studi dan skripsi ini.
2. Bapak Imamudin Yuliadi selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak kemudahan, arahan, dan bimbingan untuk penulis menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga, Bapak dan Ibu serta kakak-kakakku Rizky Yudhi Pratiwi dan Yuniar Kurnia Widasari yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya yang tanpa henti. Terima kasih sudah menjadi keluarga terbaikku.
4. Kepada teman-temanku, Dinda, Devi, Febi dan mentor terbaik Pristi terima kasih sudah memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.

5. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Ilmu Ekonomu yang telah memberikan dukungannya terima kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu semua jenis saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca dan khususnya penulis sendiri.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

Rahmi Lumantari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Rerangka Teori dan Penurunan Hipotesa.....	15
1. Kemiskinan.....	15
2. Kemiskinan Dalam Islam.....	24
3. Islam, Kemiskinan dan Solusinya.....	26
4. Faktor Penentu Kemiskinan.....	28
5. Garis Kemiskinan.....	29
6. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.....	33
B. Jumlah Penduduk.....	35
C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	39
D. Angka Harapan Hidup.....	42

E. Penelitian Terdahulu	45
F. Model Penelitian	47
G. Hipotesis Penelitian.....	49
H. Kerangka Berfikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Objek Penelitian	51
1. Jenis Data	51
2. Teknik Pengumpulan Data	51
3. Definisi Operasional Variabel Penelitian	52
B. Metode Analisis Data.....	53
C. Estimasi Model Data Panel	55
D. Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel	57
E. Uji Kualitas Instrumen dan Data.....	58
F. Uji Statistika.....	60
BAB IV GAMBARAN UMUM	62
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah.....	62
a. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah	62
b. Kondisi Kemiskinan	63
c. Jumlah Penduduk	69
d. Produk Domestik Regional Bruto	70
a. Angka Harapan Hidup.....	72
BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	75
A. Uji Kaulitas Data.....	75
1. Uji Heteroskedastisitas	75
2. Uji Multikolinearitas	76
B. Pemilihan Model Estimasi Data Panel	77
1. Uji Chow	78
2. Uji Hausman.....	79
C. Analisis Model Data Panel.....	79
D. Hasil Estimasi Model Data Panel.....	81
E. Uji Statistik dan Pengujian Hipotesa	90

1. Koefisien Determinasi (R^2)	90
2. Uji F-statistik	91
3. Uji t-statistik	91
F. Pembahasan Hasil Penelitian	93
1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan	93
2. Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap Kemiskinan	95
3. Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan	98
BAB VI KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
C. Keterbatasan Masalah	102
Daftar Pustaka	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Tahun 2012-2017.....	3
Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.....	4
Tabel 3 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017.....	63
Tabel 4 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.....	64
Tabel 7 Produk Domestik Bruto Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.....	71
Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas	77
Tabel 10 Hasil Uji Chow	78
Tabel 11 Hasil Uji Hausman	79
Tabel 12 Hasil Regresi Data Panel.....	79
Tabel 13 Hasil Estimasi Fixed Effect.....	81
Tabel 14 Estimasi Fixed Effect	90
Tabel 15 Hasil Uji t-statistik	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan	28
Gambar 2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse	34
Gambar 3 Kerangka Berpikir	50
Gambar 4 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	62

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017	66
Grafik 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017.....	67
Grafik 3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017.....	68
Grafik 4 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017.....	70
Grafik 5 Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum ada beberapa tujuan dari pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatur kembali kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan penduduk. Selain tujuan, pembangunan nasional juga memiliki sasaran. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang masih dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Berbagai macam upaya dan kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Mulai dari lingkup daerah, regional, nasional, dan internasional. Masalah kemiskinan masih banyak ditemui di negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi fokus pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan tetapi hal tersebut masih belum mampu mengatasi kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu masalah nasional yang bahkan pemerintah pun tengah mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan. Di Indonesia tingkat kesejahteraan

umum dapat diukur salah satunya dengan tingkat kemiskinan. Kesejahteraan umum dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. Sehingga semakin rendah tingkat kemiskinan, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk (Yacoub, dalam Puspita, 2015).

Kemiskinan juga tidak luput melanda Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, padahal provinsi Jawa Tengah telah melakukan banyak perkembangan seperti pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur. Jumlah masyarakat miskin di Jawa Tengah pun terbesar kedua setelah Jawa Timur. Karena tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, pemerintah memberikan perhatian yang lebih untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah (Puspita, 2015).

Dalam delapan tahun terakhir, tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Berikut akan disajikan persentase penduduk miskin menurut provinsi di wilayah Jawa tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 1
Persentase Penduduk Miskin Di Pulau Jawa Tahun 2012-2017

Provinsi	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	3.70	3.70	4.09	3.39	3.75	3,78
Jawa Barat	9.88	9.61	9.18	9.53	8.77	7.83
Banten	5.71	5.71	5.51	5.90	5.36	5.39
Jawa Tengah	14.98	14.98	13.58	13.58	13.01	12.23
Jawa Timur	13.08	13.08	12.28	12.34	11.85	11.20
Yogyakarta	15.88	15.88	14.55	14.91	13.10	12.36

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dari keenam provinsi, Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase jumlah penduduk miskin terbanyak ke-2 setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk miskin sebesar 12,23% pada tahun 2017. Kemudian diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar 11,20%, lalu Provinsi Jawa Barat sebesar 7,83% dan Provinsi Banten sebesar 5,39%. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah DKI Jakarta dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,78%. Secara keseluruhan, selama periode 2012 sampai 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2012 sampai dengan 2017 persentase penduduk miskin mengalami penurunan.

Di provinsi Jawa Tengah penduduk yang tidak bekerja masih sangat tinggi. Tingginya angka tersebut sudah termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja. Hal tersebut sangat jelas dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Apabila tingkat pendidikan seseorang

semakin rendah, maka kesempatan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan pendapatan yang layak dan tingkat kemiskinan semakin meningkat.

Berdasarkan tabel 1.1 Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Jawa pada periode 2012 sampai 2017. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah hampir tersebar ke seluruh kabupaten/ kota, hanya beberapa kabupaten/ kota besar saja yang tingkat kemiskinannya rendah. Di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2012 sampai 2017 jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017

Wilayah	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Cilacap	15.92	15.24	14.21	14.39	14.12	13.94
Kab. Banyumas	19.44	18.44	17.45	17.52	17.23	17.05
Kab. Purbalingga	21.19	20.53	19.75	19.70	18.98	18.80
Kab. Banjarnegara	18.87	18.71	17.77	18.37	17.46	17.21
Kab. Kebumen	22.40	21.32	20.50	20.44	19.86	19.60
Kab. Purworejo	16.32	15.44	14.41	14.27	13.91	13.81
Kab. Wonosobo	22.50	22.08	21.42	21.45	20.53	20.32
Kab. Magelang	13.97	13.96	12.98	13.07	12.67	12.42
Kab. Boyolali	13.88	13.27	12.36	12.45	12.09	11.96
Kab. Klaten	16.71	15.60	14.56	14.89	14.46	14.15
Kab. Sukoharjo	10.15	9.87	9.18	9.26	9.07	8.75
Kab. Wonogiri	14.67	14.02	13.09	12.98	13.12	12.90
Kab. Karanganyar	14.07	13.58	12.62	12.46	12.49	12.28
Kab. Sragen	16.72	15.93	14.87	14.86	14.38	14.02
Kab. Grobogan	16.13	14.87	13.86	13.68	13.57	13.27
Kab. Blora	15.10	14.64	13.66	13.52	13.33	13.04
Kab. Rembang	21.88	20.97	19.50	19.28	18.54	18.35

Kab. Pati	13.61	12.94	12.06	11.95	11.65	11.38
Kab. Kudus	8.63	8.62	7.99	7.73	7.65	7.59
Kab. Jepara	9.38	9.23	8.55	8.50	8.35	8.12
Kab. Demak	16.73	15.72	14.60	14.44	14.10	13.41
Kab. Semarang	9.40	8.51	8.05	8.15	7.99	7.78
Kab. Temanggung	12.32	12.42	11.55	11.76	11.60	11.46
Kab. Kendal	13.17	12.68	11.80	11.62	11.37	11.10
Kab. Batang	12.40	11.96	11.13	11.27	11.04	10.80
Kab. Pekalongan	13.85	13.51	12.57	12.84	12.90	12.61
Kab. Pemalang	19.27	19.27	18.44	18.30	17.58	17.37
Kab. Tegal	10.75	10.58	9.87	10.09	10.10	9.90
Kab. Brebes	21.12	20.82	20	19.79	19.47	19.14
Kota Magelang	10.31	9.80	9.14	9.05	8.79	8.75
Kota Surakarta	12	11.74	10.95	10.89	10.88	10.65
Kota Salatiga	7.11	6.40	5.93	5.80	5.24	5.07
Kota Semarang	5.13	5.25	5.04	4.97	4.85	4.62
Kota Pekalongan	9.47	8.26	8.02	8.09	7.92	7.47
Kota Tegal	10.04	8.84	8.54	8.26	8.20	8.11

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan tabel 2, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2012-2017 mengalami fluktuasi. Dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Wonosobo dengan jumlah penduduk miskin sebesar 20,32%, kemudian diikuti Kabupaten Kebumen dengan jumlah penduduk sebesar 19,60%, Kabupaten Brebes sebesar 19,14%. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk miskin terendah yakni Kabupaten Semarang dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,62%.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan salah satunya yaitu, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di berbagai

wilayah atau daerah akan terus bertambah setiap tahun tergantung pada angka kelahirannya. Apabila jumlah penduduk terus bertambah besar dan tidak bisa dikendalikan dapat menjadi masalah bagi pemerintah karena akan meningkatkan angka kemiskinan. Namun, pertumbuhan penduduk juga dapat mengurangi angka kemiskinan apabila penduduk tersebut mampu mendapatkan pekerjaan yang bisa memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Tetapi sayangnya, pemerintah masih belum bisa memenuhi lapangan pekerjaan bagi para masyarakat apabila jumlah penduduk terlalu tinggi. Hal ini dapat terjadi karena setiap daerah mempunyai pertumbuhan pembangunan yang berbeda, ada yang mencapai pertumbuhan cepat adapula yang mencapai pertumbuhan lambat. Selain itu, kekayaan sumber-sumber yang dimiliki dan sarana prasarana daerah seperti sarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan lain-lain juga dapat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu daerah. (Arifin, 2010 dalam Azizah dkk, 2018).

Selain jumlah penduduk, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pendidikan. Dapat dikatakan jika pendidikan merupakan salah satu hal penting yang tidak bisa diabaikan. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi produktivitas seseorang untuk menghasilkan barang dan jasa. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mempunyai gagasan yang baik dalam memproduksi barang dan jasa. Apabila gagasan tersebut diterima baik oleh masyarakat luas, maka semua orang bisa menggunakan gagasan tersebut

sebagai manfaat dari pendidikan. Sebagian besar orang setuju bahwa pendidikan merupakan aset untuk pembangunan di masa depan. Karena pendidikan berkaitan dengan pembangunan karakter masyarakat. Maka setiap masyarakat yang ingin sukses menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengurangi kebodohan dan kemiskinan (Aziz dkk, 2016).

Apabila dihubungkan dengan teori lingkaran setan versi Nurkse, bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan adalah hal yang harus diatasi untuk mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi. Keterbelakangan dan ketertinggalan tersebut bisa diatasi dengan meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Karena pendidikan merupakan Human Capital, maka semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan meningkatkan produktivitas orang tersebut dalam menghasilkan barang dan jasa. Sehingga pendapatan yang diterima akan meningkat, baik bagi individu maupun pendapatan nasional. Apabila pendapatan individu meningkat, maka tingkat konsumsi akan meningkat dan dapat melepaskan mereka dari kemiskinan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat kesehatan. Kesehatan adalah standar hidup minimum yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat. Karena dengan kesehatan masyarakat yang baik, akan berdampak dengan meningkatnya produktivitas masyarakat sehingga pendapatan yang didapatkan akan meningkat sejalan dengan perbaikan kesehatan di masyarakat. Kesehatan adalah salah

satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dimana kondisi kesehatan juga harus diperhatikan. Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia maka keduanya harus berjalan seimbang. Pembangunan kesehatan merupakan sebuah proses perubahan terhadap tingkat kesehatan sekelompok penduduk dari tingkat yang kurang baik menjadi tingkat yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia (Juanita dalam Jacobus, 2018).

Nurkse dalam teori lingkaran setan mengungkapkan bahwa produktivitas yang rendah merupakan faktor yang menyebabkan kemiskinan. Produktivitas yang rendah dapat disebabkan karena tingkat kesehatan yang rendah. Sehingga akan mengurangi etos kerja dan produktivitas seseorang. Akibatnya akan berdampak pada menurunnya pendapatan yang dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap kemiskinan.

Selanjutnya ada pengangguran yang dapat mempengaruhi kemiskinan. pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah kemiskinan (Sukirno,2006 dalam Ramdani, 2015). Pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat dan akan

berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan. Apabila tingkat kesejahteraan masyarakat menurun akan memunculkan masalah lain yaitu kemiskinan yang akan bertambah (Sukirno, 2006: 87 dalam Agustina dkk, 2018).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah. Tahun ke tahun pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran untuk mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia kecenderungannya meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah yang dijadikan program pengentasan kemiskinan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. belanja untuk program kemiskinan terus bertambah belum menjadi ukuran prestasi. Pemborosan dana pemerintah yang sangat besar menjadikan beban negara semakin membengkak karena dana pemerintah tersebut dida[at dari dana pinjaman (Ramdani, 2015).

Faktor lain yang dapat menyebabkan pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia adalah alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan suatu daerah yang mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan di daerah tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan suatu daerah mempunyai nilai IPM yang tinggi yang biasanya diikuti oleh kualitas hidup masyarakat juga tinggi. Dengan kata lain, apabila nilai IPM suatu daerah tinggi, maka tingkat kemiskinan di daerah tersebut seharusnya

rendah. Terdapat empat komponen dalam indeks pembangunan manusia, yaitu bidang kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, rata-rata besarnya pengeluaran perkapita untuk melihat kemampuan daya beli masyarakat yang dilihat dari pendekatan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam bidang pengembangan hidup layak (Alhudori, 2017).

Pada umumnya jumlah penduduk miskin akan terus bertambah apabila tidak ada solusi yang tepat dari pemerintah. Pulau Jawa sebagai wilayah terpadat di Indonesia pasti sangat sulit dalam mengatasi kemiskinan. Selain itu, pulau Jawa juga merupakan pulau dengan jumlah penduduk miskin terbesar sehingga pemerintah dari setiap provinsi harus secepat mungkin mencari solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan. (Djojohadikusumo, 1994 dalam Rizzal dkk, 2017).

Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskina sangatlah serius, bahkan menjadi salah satu program utama, termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Terdapat dua poin penting yang menjadi fokus pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan. pertama adalah pada bidang pertanian yaitu dengan dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan Desa Berdikari yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun penduduk sekitar, bantuan keuangan ke pemerintah desa dan Desa Binaan. Kedua adalah pada bidang ekonomi yang produktif yaitu dengan

melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dan bukan merupakan kegiatan simpan pinjam dan usaha dagang (mengambil margin laba). Poin arahan yang diberikan antara lain :

1. Diperlukannya komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan dengan berdikari/ mandiri
2. Hal yang harus menjadi yang utama adalah gotong-royong dalam masyarakat
3. Melakukan pemetaan untuk penanganan kemiskinan yang maksimal dan pengangguran di desa rawan kemiskinan
4. Bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin perlu dilakukan pembekalan keterampilan, permodalan dan pendampingan usaha
5. Revitalisasi pasar desa untuk pemasaran hasil usaha ekonomi produktif
6. Pembangunan infrastruktur untuk kelancaran arus distribusi barang/ jasa
7. Pengembangan usaha ekonomi produktif di desa perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait
8. Melakukan pendampingan pada usaha masyarakat secara nyata, seperti pemberdayaan pekarangan, kolam lele sederhana, posyandu)

Kegiatan diatas dianggap lebih strategis untuk dilaksanakan sebelum dilakukan pembahasan program atau kegiatan masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Provinsi Jawa Tengah sehingga dengan adanya kegiatan ini setiap SKPD dapat mengalokasikan program

atau kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. (Bappeda Jawa Tengah, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah penting di Provinsi Jawa Tengah. Belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh kabupaten/ kota menjadi penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap kabupaten/ kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Lokasi yang menjadi tempat penelitian dibatasi pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah
2. Tahun penelitian dibatasi pada kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2017
3. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan di Kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah dan variabel independen adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan angka harapan hidup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, mengenai kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan kebijakan guna

mengentaskan angka kemiskinan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Dapat memberi masukan bagi Bappeda dan BPS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.
3. Sebagai referensi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan kemiskinan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Rerangka Teori dan Penurunan Hipotesa

1. Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan yang minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2019). Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan abosolut ini biasanya identik dengan pemenuhan kebutuhan seseorang. Kebutuhan tersebut hanya dibatasi pada kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskian relatif ini terjadi karena adanya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pengaruh dari kebijakan pembangunan

yang belum merata dan belum dapat dijangkau oleh masyarakat secara keseluruhan.

Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.

Menurut Robert Chambers (2010) dalam Dama dkk (2016) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep terintegrasi yang memiliki lima dimensi, yaitu :

- 1) Kemiskinan (*proper*)
- 2) Ketidakberdayaan (*powerless*)
- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)
- 4) Ketergantungan (*dependence*) dan
- 5) Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sulit dihadapi bagi para pembuat kebijakan. Keluarga miskin memiliki kecenderungan yang lebih tinggi menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan rendah dibandingkan dengan keseluruhan populasi.

Ciri-ciri kelompok miskin :

- 1) Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan
- 2) Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah

- 3) Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setelah menganggur (tidak bekerja)
- 4) Kebanyakan berada di daerah pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (slum area)
- 5) Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup) bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya. (Suryawati, 2005 dalam Dama dkk, 2016).

Menurut Spicker dalam Agustina dkk (2018) ada beberapa penyebab kemiskinan yang dibagi menjadi 4 Mahzab, pertama adalah *Individual Explanation* yaitu kemiskinan yang terjadi akibat orang miskin itu sendiri, penyebabnya antara lain malas, kekurangan atau kecacatan, miskin karena salah dalam membuat keputusan atau pilihan, mempunyai anak pada waktu yang kurang tepat, gagal untuk bekerja dan sebagainya. Kedua adalah *Familial Explanation* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keturunan sehingga akan terjadi ketidakberuntungan pada generasi selanjutnya. Ketidakberuntungan ini dapat berupa asuhan dan pendidikan. Ketiga adalah *Subcultural Explanation* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh pola perilaku, tetapi lebih disebabkan karena keadaan pada pilihan personal. Keempat adalah *Structural Explanation* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kesenjangan sosial hasil dari masyarakat di tempat tersebut, seperti adanya kesenjangan sosial, kelas, status atau kekuatan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, dan papan,

pendidikan, atau kesehatan. Kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar dan sulitnya akses pendidikan serta pekerjaan dapat menyebabkan kemiskinan. Selain itu, masalah umum yang dapat menggambarkan kemiskinan adalah gambaran kekurangan materi, gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi pada masyarakat serta gambaran tentang kurangnya penghasilan yang memadai.

Banyak yang menyatakan bahwa terjadinya kemiskinan relatif berdasarkan pendapatan yang rendah serta memiliki keterkaitan dengan kesehatan yang buruk. Namun, pendekatan pendapatan relatif mempunyai beberapa keterbatasan untuk menjelaskan aspek kemiskinan yang beragam dan kompleks. Terdapat beberapa tantangan dalam konsep kemiskinan, seperti meningkatnya seperti meningkatnya beban kerja klinis, kompensasi keuangan untuk kebutuhan tambahan yang tidak wajar, dan investasi dalam pelayanan masyarakat untuk kebutuhan mereka. Meskipun terdapat beberapa tantangan, kesenjangan yang tidak teratasi akan menyebabkan hasil yang lebih buruk dan meningkatnya biaya dalam jangka panjang. Indeks kemiskinan ditentukan oleh pendapatan sebelum pajak dan disesuaikan dengan perubahan biaya hidup secara keseluruhan setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam indeks harga konsumen.

Kemiskinan berifat multidimensi yang mempunyai arti bahwa kebutuhan manusia beragam maka kemiskinan juga mempunyai banyak aspek, seperti aspek primer adalah miskin akan modal, organisasi sosial,

politik, pengetahuan dan keterampilan dan aspek sekunder adalah miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Aspek-aspek kemiskinan tersebut dapat dilihat dalam bentuk kekurangan gizi, rumah yang tidak layak, kesehatan yang kurang baik dan pendidikan rendah. Semua aspek kemiskinan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga apabila ada kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek maka akan mempengaruhi aspek lainnya (Arsyad, 2004: 104 dalam Agustina dkk, 2018).

Banyak yang mengira bahwa kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan dua hal yang sama. Namun kenyataannya ada perbedaan antara kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Perbedaan ini perlu di tegaskan. Kemiskinan sangat berkaitan dengan standar hidup yang absolut, sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan mengacu pada standar hidup relatif dari keseluruhan masyarakat. Selain itu, kemiskinan sering dipahami dengan rendahnya tingkat kesejahteraan semata, tetapi kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi. artinya, ada keterkaitan antara berbagai macam kebutuhan manusia dengan kemiskinan.

Suryawati (dalam Aziz dkk, 2016) menyatakan bahwa hidup dalam kemiskinan tidak hanya hidup dalam kekurangan materi serta tingkat penghasilan yang rendah, melainkan mencakup banyak hal, seperti kesehatan rendah, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, rentan terhadap ancaman kriminal, serta ketidakmampuan dalam

menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu :

- a. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.
- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Daerah-daerah seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif dan relatif bergantung pada pihak lain.
- d. Kemiskinan struktural, kemiskinan ini terjadi karena akses terhadap sumber daya dalam sistem sosial budaya dan sosial politik rendah dan akan menyebabkan kemiskinan meningkat dengan pesat.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, adapula kemiskinan yang berdasarkan sifat. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kurangnya sumber daya alam dan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), serta keadaan tanah yang tandus (kurang subur). Wilayah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah wilayah yang belum tersentuh oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak disebabkan karena sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata. Kemiskinan buatan merupakan kemiskinan yang terjadi dari dampak negatif pelaksanaan pembangunan (*developmentalism*) yang biasanya dilakukan oleh negara sedang berkembang. Hal ini terjadi karena sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan tidak meratanya distribusi hasil-hasil pembangunan di sektor industri seperti lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan ini seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang telah dilaksanakan sejak lama oleh negara sedang berkembang pada periode 1970an dan 1980 (Jarnasy dalam Jacob, 2018).

Menurut Kartasmita (1996) dalam (Usman dan Diramita, 2018) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diklarifikasikan menjadi empat berdasarkan pola waktu, meliputi :

- a) Persistent poverty, yaitu kemiskinan yang terjadi dari turun-menurun.
- b) Cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang didasari dari keadaan ekonomi secara keseluruhan.
- c) Seasonal poverty, yaitu kemiskinan yang bersifat musiman biasanya dijumpai pada penduduk yang berprofesi nelayan dan petani.
- d) Accident poverty, yaitu kemiskinan yang disebabkan adanya bencana alam, kekerasan dan konflik.

Terdapat dua faktor utama untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu negara, pertama adalah tingkat pendapatan rata-rata dan yang kedua adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Apabila tingkat pendapatan rata-rata suatu daerah tinggi tetapi distribusi pendapatan pada daerah tersebut belum merata maka tingkat kemiskinan akan terus bertambah. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat distribusi pendapatan suatu daerah sudah merata tetapi pendapatan rata-rata daerah tersebut rendah maka kemiskinan akan bertambah besar (Todaro dan Smith dalam Ramdani, 2015)

Kemiskinan berhubungan erat dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara finansial dan sosial serta membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari mereka yang mampu. Pernyataan ini juga menegaskan fakta bahwa

kemiskinan mengacu pada mereka yang mengalami kurang relatif (Igbari, 2016).

Dekker (2004) dan Leliveld (2006) dalam Khemili dan Belloumi (2015) menyatakan bahwa penyakit adalah resiko yang sering dihadapi oleh masyarakat di negara berkembang. Penyakit kemungkinan akan mengurangi pendapatan apabila mereka tidak bekerja dan tidak bisa membayar biaya perawatan. Mereka seringkali membayar biaya perawatan dengan menjual aset produktif mereka seperti tanah dan ternak. Strategi semacam itu dapat meningkatkan resiko terjebak dalam kemiskinan. kemiskinan adalah subjek topikal dan karenanya harus menjadi fokus utama program sosial dan pengembangan di masa depan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi yang mampu untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti menyediakan lapangan pekerjaan adalah salah satu cara paling berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan (Schell-Adlung et al. 2006 dalam Khemili dan Belloumi, 2015).

Dari sisi ekonomi penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama secara mikro. Dilihat dari aspek mikro ekonomi kemiskinan muncul karena adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki sehingga akan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Biasanya penduduk miskin hanya mempunyai sedikit sumber daya alam dengan kualitas yang rendah. Kedua kemiskinan muncul karena adanya perbedaan sumberdaya manusia. Apabila kualitas sumberdaya manusia rendah itu

berarti produktivitas yang mereka hasilkan untuk menciptakan barang dan jasa juga rendah yang kemudian akan berdampak pada upah yang rendah pula. Ketiga, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan dalam akses modal (Waluyo, 2013 dalam Azizah dkk, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengurangi kemiskinan, antara lain adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan membangun dan meningkatkan sistem perlindungan sosial bagi orang-orang miskin (Titaley, 2015).

2. Kemiskinan Dalam Islam

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat. Kemiskinan telah menyebar di seluruh negara, tidak terkecuali negara muslim, kemiskinan bukan hal yang aneh bahkan telah menyebar di berbagai negara yang sebagian besar penduduknya adalah muslim. Padahal, Islam sangat menjauhi kemiskinan, dan menyarankan setiap muslim agar menjadi kaya dan tidak bergantung dengan orang lain.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin* yang menyarankan agar setiap muslim mampu bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pada saat seseorang bekerja, hal tersebut merupakan salah satu ibadah yang telah dijalankannya untuk bekal menuju kehidupan sebenarnya yaitu akhirat (Setiawan dan Hasanah, 2016).

a. Hadits Nabi Muhammad SAW Tentang Kemiskinan

1) Matan Hadits

a) Hadits Riwayat Ibnu Majah

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و عبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد ابن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدرى قال أحبوا المساكين فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيى مسكينا وأميتى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين

Abu Bakar bin Abi syaibah dan Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Khalid al-Ahmar menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Sinan dari api al-mubarak dari 'atha' dari api sa'id al-khudry, ia berkata, "Cintailah orang miskin, saya mendengar nabi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah saya hidup dalam kemiskinan, matikanlah dalam kemiskinan dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang miskin. (HR. Ibn Majah)

b) Hadits Riwayat Abu Daud

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا إسحق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم

Menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, menceritakan kepada kami Hammad, mengabarkan kepada kami Ishaq, dari Abdillah dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW berdoa: "Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kekafiran, kekurangan, dan aku berlindung dari menzalimi dan dizalimi. (HR. Al-Nasa'i)

Terdapat perbedaan pandangan antara dua hadits tersebut diatas. Hadits pertama menyatakan bahwa Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT supaya beliau dijadikan orang miskin, mati dalam keadaan miskin, dan berkumpul bersama dengan orang-orang miskin. Sedangkan hadits kedua menyatakan bahwa Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kefakiran, kekurangan, dan dari kedzaliman.

3. Islam, Kemiskinan dan Solusinya

Didalam al-Qur'an kata miskin selalu disandingkan bersamaan dengan kata fakir. Dua kata ini merupakan awal mula konsep kemiskinan dalam al-Qur'an. Sebanyak 25 kali kata miskin disebutkan dalam al-Qur'an dan sebanyak 13 kali kata fakir disebutkan dalam al-Qur'an. Salah satu surat yang menjelaskan tentang kemiskinan adalah QS. Al-Fathir [35] : 9

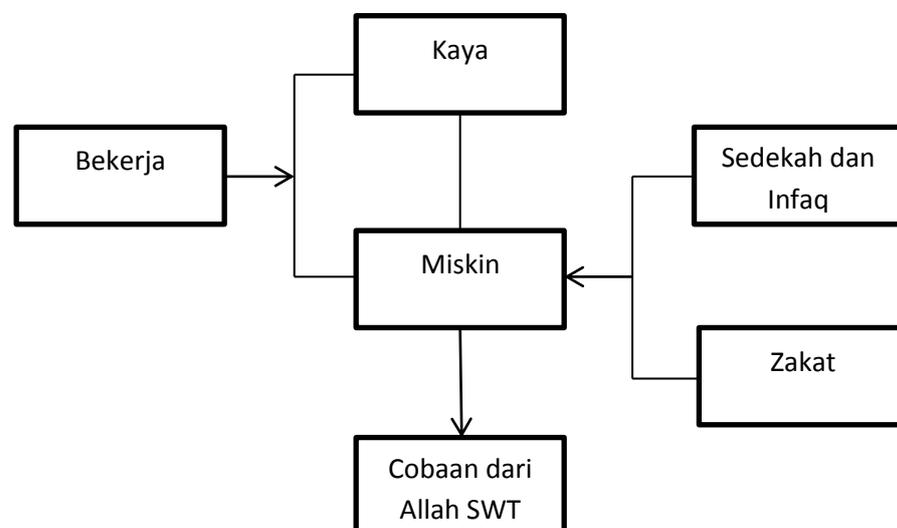
وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْحَىٰ رُوحًا سَحَابًا فَسُقْنَا مِنْهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ
فَأَحْيَا فِيهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ رَضُوا بِالْإِسْلاَمِ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْظُلُمِ

Kemiskinan dalam al-Qur'an adalah cobaan yang selalui dikaitkan dengan ketakutan akan kekurangan harta, jiwa dan makanan. Tetapi,

merupakan hal yang penting bagi seorang miskin apabila dia bisa sabar dan selalu beriman kepada Allah SWT, serta percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kepada-Nya lah segala sesuatu akan kembali. Kemiskinan adalah *sunnatullah* yang tidak akan hilang dan selalu ada dimuka bumi. Bahkan kedudukan manusia sebagai hamba Allah adalah refleksi dari kemiskinan manusia kepada Allah SWT (QS. Fathir [35] : 9).

Tetapi, walaupun kemiskinan adalah *sunnatullah*, seorang muslim senantiasa diwajibkan untuk bisa memperoleh rezeki yang lebih agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Sehingga kefakiran dan kemiskinan dapat dihindari. Sebagaimana doa Rasulullah SAW selalu berdoa agar terhindar dari kemiskinan kedzaliman, dan kelemahan {HR. Abu Daud an-Nasa'i).

Dalam Islam, ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan, yaitu dengan bekerja, dengan sadaqah dan infaq serta zakat. Berikut merupakan gambaran daripada solusi Islam untuk mengatasi persoalan kemiskinan :



Gambar 1 Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan

(Sumber : Yusuf Qardhawi, 2010 dalam Hakim, 2018)

4. Faktor Penentu Kemiskinan

Terdapat beberapa faktor penentu utama kemiskinan, yaitu karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga dan karakteristik individu. Biasanya setiap daerah mempunyai hubungan yang berbeda antara karakteristik wilayah dengan kemiskinan. Kemiskinan banyak terjadi di daerah yang memiliki letak geografis yang sulit dijangkau, sumber daya yang rendah dan keadaan iklim yang tidak menentu.

Kemudian hubungan karakteristik masyarakat dengan kemiskinan menyangkut tingkat kepercayaan diri dalam masyarakat dimana pentingnya organisasi sosial dan “modal sosial”. Selain untuk menghilangkan kesenjangan sosial juga merupakan upaya efektif untuk mengurangi kemiskinan serta memperluas organisasi sosial masyarakat miskin. Organisasi sosial disini mengacu pada sistem kekeluargaan, jaringan masyarakat miskin dan organisasi lokal serta dapat dianggap sebagai bentuk lain dari modal sosial. Sedangkan hubungan modal sosial dengan pembangunan merupakan keterampilan sosial individu, toleransi antar sesama, menyelesaikan masalah, dan lain-lain.

Ukuran dan struktur rumah tangga merupakan suatu hal yang penting karena merupakan indikator dalam sebuah hubungan yang baik antara kemiskinan dengan struktur rumah tangga (Houghton dan

Khandker, 2012). Perbedaan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin dapat dilihat dari susunan rumah tangga, seperti jumlah anggota rumah dan karakteristik rumah tangga seperti usia.

Faktor penentu kemiskinan yang terakhir bisa dilihat melalui tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, seperti pendidikan terakhir yang dicapai, jarak tempuh dengan sekolah dan fasilitas pendidikan oleh masyarakat miskin dan tidak miskin. Ada dua indikator penting yaitu kemampuan baca tulis dan pendidikan untuk menentukan kualitas hidup dan hak mereka sebagai penentu kemampuan orang miskin agar dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan.

5. Garis Kemiskinan

Ukuran kemiskinan atau garis kemiskinan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu untuk mengetahui standar yang menunjukkan bahwa seseorang berada dibatas miskin apabila dilihat dari sisi konsumsi dapat dilihat melalui kebutuhan non-makanan yang mereka konsumsi. Tidak ada garis kemiskinan yang umum digunakan, karena setiap negara memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara lokasi dan standar kebutuhan hidup yang berbeda di setiap negara.

Menurut BPS (2019) garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan

non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah nilai dikeluarkan untuk kebutuhan minimum makanan, seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, minyak, susu, kacang-kacangan, sayuran, dan sebagainya. Biasanya pengeluaran makanan sebanyak 2.100 kilokalori perkapita perhari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah nilai yang dikeluarkan untuk kebutuhan minimum seperti, rumah, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Rumus penghitungan garis kemiskinan :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Teknik penghitungan GKM

- a. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

- b. Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disertakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyertaan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung garis kemiskinan makanan (GKM) adalah :

$$GKM^*_{JP} = \sum_{K=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} = Garis kemiskinan makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p

P_{jkp} = Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p

J = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

P = Provinsi ke-p

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

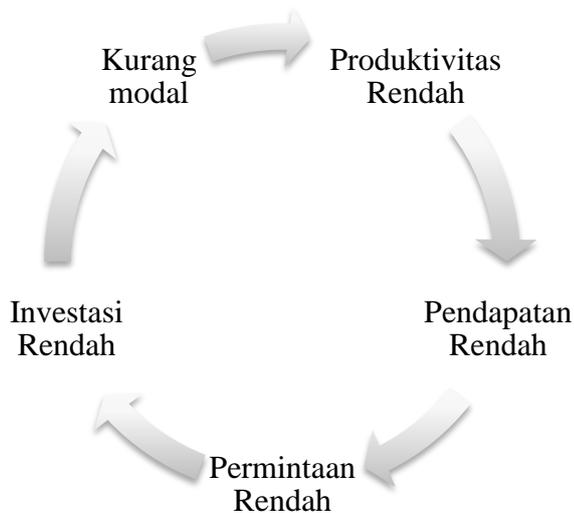
HK_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

- c. Garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah penjumlahan dari nilai kebutuhan minimum dari komoditi non-makanan, seperti rumah, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/ sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/ sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

6. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran kemiskinan diartikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang akan mempengaruhi satu sama lain sehingga akan menyebabkan suatu keadaan dimana sebuah negara akan berada pada titik kemiskinan dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik akan mengalami banyak kesulitan yang harus dihadapi.

Menurut Nurkse dalam Agustina dkk (2018: 269) mengungkapkan bahwa lingkaran kemiskinan merupakan suatu rangkaian yang mempengaruhi satu sama lain dengan sedemikian rupa, sehingga akan mengakibatkan keadaan suatu negara mengalami kemiskinan serta menghadapi banyak kesulitan untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan produktivitas menurun sehingga pendapatan yang diterima pada akhirnya juga rendah. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, kemudian rendahnya investasi tersebut akan menyebabkan keterbelakangan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Menurut Nurkse Ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, sehingga mengurangi modal dan tingkat produktivitas rendah dan seterusnya. Dari sisi permintaan (*demand*), pada negara-negara miskin biasanya kemampuan dalam menanam modal sangat rendah. Rendahnya kemampuan dalam menanam modal disebabkan karena terbatasnya luas pasar yang digunakan untuk berbagai macam jenis barang. Hal ini terjadi karena pendapatan masyarakat yang juga sangat rendah. Pendapatan masyarakat rendah terjadi karena produktivitas yang dimiliki masyarakat rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Kurangnya dorongan untuk menanamkan modal menyebabkan pembentukan modal menjadi terbatas. (Nurkse dalam Didu dan Fauzi, 2016).

B. Jumlah Penduduk

Secara umum, negara berkembang memiliki peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Peningkatan jumlah penduduk ini bukan hanya masalah jumlah tetapi menyangkut kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai jumlah penduduk dan pembangunan suatu negara. Pendapat pertama mengatakan bahwa jumlah penduduk dapat menjadi penghambat suatu negara dalam melakukan pembangunan, tetapi pendapat lain mengatakan bahwa jumlah penduduk dapat dianggap sebagai pemacu pembangunan suatu negara.

Alasan mengapa bahwa jumlah penduduk dapat dikatakan sebagai penghambat pembangunan karena apabila jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk suatu daerah tinggi, dianggap hanya akan menjadi beban pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan pendapatan perkapita menjadi rendah dan akan menyebabkan masalah ketenagakerjaan. Penduduk merupakan pemacu pembangunan karena populasi penduduk yang besar sebenarnya adalah pasar potensial untuk meningkatkan produksi berbagai macam barang dan jasa sehingga akan menciptakan kegiatan ekonomi yang menguntungkan semua pihak yang kemudian biaya produksi akan turun dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran akan tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan

merangsang output atau produksi agregat lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang akan menurunkan tingkat kemiskinan (Suprianto dkk, 2017).

Jumlah penduduk adalah semua orang yang menetap di suatu daerah selama sebulan atau lebih dan atau mereka yang menetap kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2019). Jumlah penduduk yang besar dilihat dari sisi permintaan merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, dengan kata lain merupakan faktor pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sedangkan jumlah penduduk yang besar dilihat dari sisi penawaran merupakan faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang diperlukan dan banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun disuatu wilayah (Robinson dalam Didu dan Fauzi, 2016).

Selain akan berdampak buruk terhadap persediaan bahan pangan, laju pertumbuhan penduduk juga akan menciptakan masalah lain pada pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Alasan pertumbuhan penduduk dikatakan sebagai penghambat pembangunan dibagi menjadi tiga (Meier dalam Didu dan Fauzi, 2016), yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan konsumsi semakin meningkat. Rendahnya sumberdaya perkapita akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk lebih cepat dan mengakibatkan investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.

2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mengancam ketidakseimbangannya antara sumber daya alam yang langka karena banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Salah satu penyebab ketergantungan tersebut adalah karena pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan perpindahan penduduk dari bidang pertanian tradisional ke bidang pertanian modern atau pekerjaan modern lainnya menjadi lambat.
3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan kesulitan dalam meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tinggi tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada negara sedang berkembang pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang menurun dan akan mengakibatkan penambahan penduduk miskin. Karena pada negara sedang berkembang pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi penghambat negara tersebut dalam melakukan pembangunan ekonomi (Nelson dan Leibstein dalam Agustina dkk, 2018).

Teori siklus populasi kemiskinan adalah pendapat utama dari para ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan berbagai macam konsekuensi ekonomi yang merugikan. Salah satunya adalah kemiskinan yang bersifat kronis yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu daerah, sementara faktor

produksi yang dihasilkan jumlahnya tetap maka persediaan hanya akan meningkat menurut deret hitung, karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat, sehingga pendapatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) akan terus mengalami penurunan sampai serendah mungkin sehingga masyarakat harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten menurut teori Malthus (Malthus dalam Agustina dkk, 2018).

Jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat. Hubungan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan ini dapat bersifat positif dan negatif tergantung pada kualitas pertumbuhan penduduk itu sendiri. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi positif jika pertumbuhan penduduk tersebut dapat menambah tenaga kerja yang akan meningkatkan sektor produksi untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang bersifat negatif dapat terjadi jika pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat meningkatkan produksi sehingga dapat menyebabkan kebutuhan konsumsi hasil-hasil produksi menurun. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang baik adalah jika pertumbuhan penduduk lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi (Agustina dkk, 2018)

Ada beberapa konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk, yaitu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan

pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional, distribusi pendapatan, biasanya dapat diartikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud (Todaro dan Smith (2006) dalam Supriyanto dkk, 2017).

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan dari semua produk yang telah dihasilkan dari suatu daerah selama satu periode dimana jumlah barang dan jasa tersebut diukur dengan uang atas harga pasar yang sedang berjalan. Sehingga pada umumnya perhitungan pendapatan regional berdasarkan pada harga berlaku, inflasi sehingga tidak selalu pendapatan yang diterima adalah kenaikan riil. Karena itu, perhitungan pendapatan juga didasarkan pada harga konstan (harga tahun dasar) untuk melihat kenaikan atau penurunan secara riil dari kenaikan atau penurunan perekonomian suatu daerah (Alhudori, 2017)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi dasar dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Apabila laju pertumbuhan ekonomi semakin cepat maka distribusi pendapatan untuk rumah tangga faktor produksi akan membaik. Karena salah satu faktor yang memengaruhi kesejahteraan faktor produksi adalah pertumbuhan ekonomi. Karena jika pertumbuhan ekonomi semakin membaik otomatis produktivitas faktor produksi juga akan meningkat dan upah yang diterima para pekerja juga akan tinggi. Sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin yang semakin berkurang (Ramdani, 2015).

Menurut (BPS, 2019) nilai PDRB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

a. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB merupakan total nilai tambah atas unit produksi yang berupa barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan komodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17. Jasa lainnya

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah imbalan dari faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi suatu wilayah pada waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Maksud dari imbalan tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang belum dipotong oleh pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya). Dalam hal ini berarti PDRB termasuk di dalamnya menyangkut penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung yang dikurangi dengan subsidi.

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

1. Geluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto
4. Perubahan inventori, dan
5. Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor)

Pada dasarnya nilai yang dihasilkan akan sama dari semua pendekatan tersebut. Jumlah pengeluaran yang dihasilkan harus sama dengan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh faktor produksi. PDRB ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena termasuk didalamnya mengandung pajak tidak langsung neto.

Keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi yang dilihat dari sisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan nilai PDRB yang meningkat pada daerah tersebut. Namun penungkatan PDRB tersebut tidak menjamin bahwa keseluruhan masyarakatnya sudah merasakan kesejahteraan. PDRB digunakan untuk menggambarkan gambaran umum dari kesejahteraan masyarakat saja. Selain itu PDRB juga dapat digunakan untuk indikator pembangunan. Pendapatan yang diterima masyarakat akan meningkat apabila PDRB disuatu daerah juga meningkat, sehingga menciptakan sumber penerimaan daerah tersebut juga meningkat. (Thamrin, 2001 dalam Alhudori, 2017).

D. Angka Harapan Hidup

Terdapat beberapa anggapan ekonomi bahwa kesehatan adalah fenomena ekonomi yang bisa dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga ataupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Untuk mengukur kesehatan individu di suatu wilayah dapat menggunakan Angka Harapan Hidup sebagai indikator. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan umur yang dapat ditempuh oleh seseorang semasa hidupnya. Selain itu, angka harapan hidup juga dapat dikatakan sebagai umur yang mungkin dapat ditempuh oleh seseorang yang lahir pada tahun tertentu (Suprianto dkk, 2017).

Kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat kesehatan masyarakat disuatu wilayah salah satunya adalah dengan angka harapan hidup diwilayah tersebut. Sehat tidak hanya mencerminkan kondisi bebas dari penyakit dan kesejahteraan fisik saja tetapi juga mencerminkan kondisi dimana mental dan sosial seseorang juga baik. Mereka yang baik dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani akan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan yang relatif lebih tinggi (WHO dalam Dores, 2015).

Menurut Sukirno (dalam Dores, 2015) indikator kesehatan yang berkaitan dengan status kesehatan individu atau kelompok disuatu daerah dapat dilihat dari :

- a. Angka kelahiran dan angka kematian
- b. Angka kesakitan
- c. Angka harapan hidup
- d. Angka yang menyangkut proses persalinan

Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki layanan kesehatan untuk penduduk karena kesehatan dapat menyebabkan produktivitas penduduk menjadi meningkat terutama bagi mereka yang bekerja. Karena efisien kerja mereka meningkat akan menyebabkan kemampuan mental dan fisik mereka menjadi lebih baik dan pada akhirnya pendapatan yang akan mereka terima menjadi lebih besar. Hal ini akan sangat berpengaruh

baik pada kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan tercermin pada berkurangnya jumlah penduduk miskin (Dores, 2015).

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Dalam konteks kesehatan, konsumsi nutrisi yang buruk merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak pada kemiskinan. Sehingga apabila suatu negara yang penduduknya sehat maka diyakini bahwa akan mempunyai perekonomian yang “sehat” pula (Mariyanti dan Mahfudz dalam Bintang dan Woyanti, 2018). Menurut Wyk dan Bradshaw (2017) masyarakat yang memiliki angka harapan hidup yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih

tinggi. Sedangkan menurut Ataguba, et al (2013 dalam Bintang dan Woyanti, 2018) kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Puspita (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah dengan metode penelitian menggunakan regresi data panel model *Random Effect Generalized Least Square*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, PDRB mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
2. Alhudori (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh IPM, PDRB, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) pada kabupaten/ kota Jambi tahun 2016. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi linier berganda IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin, berdasarkan analisis regresi linear berganda PDRB mempunyai hubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, berdasarkan analisis regresi linear berganda jumlah

pengangguran mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin.

3. Ramdani (2015) melakukan penelitian mengenai Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-1012 dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis ekonometrika. Analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan, secara parsial pengeluaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
4. Bintang dan Woyanti (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015) dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis *Fixed Effect Model* atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat rata-rata lama sekolah dan tingkat harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
5. Suprianto, Pamungkas dan Zikriana (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan

Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015 dengan menggunakan metode penelitian asosiatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

F. Model Penelitian

Dibawah ini merupakan gambar yang menunjukkan hubungan antara variabel dependen Kemiskinan dengan variabel independen Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Angka Harapan Hidup (AHH).

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Permasalahan dasar yang sering terjadi di suatu wilayah atau daerah salah satunya adalah jumlah penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk di suatu daerah atau wilayah tidak dapat dikendalikan maka akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun dan tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kemiskinan.

Menurut Nelson dan Leibstein (dalam Didu dan Fauzi, 2016) pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh langsung. Pengaruh langsung yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk adalah apabila pertumbuhan penduduk di suatu daerah tinggi maka kesejahteraan masyarakat tidak akan mengalami

perubahan ke arah yang lebih baik dan dalam jangka panjang masalah ini akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun dan jumlah penduduk miskin akan meningkat.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan disuatu daerah harus diikuti dengan kondisi dimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut tinggi dan stabil. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan maka akan menghasilkan ketimpangan pendapatan (*ceteris paribus*), sehingga dalam jangka panjang akan menimbulkan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2003 dalam Dama dkk, 2016). Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diikuti berdasarkan pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdasarkan pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke

barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang (Kuncoro dalam Dama dkk, 2016).

3. Hubungan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan

Angka harapan hidup dapat digunakan sebagai indikator dalam melihat perkembangan kesehatan disuatu wilayah tertentu. Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya usia hidup penduduk di suatu wilayah tertentu. Sehat tidak hanya mencerminkan kondisi bebas dari penyakit dan kesejahteraan fisik saja tetapi juga mencerminkan kondisi dimana mental dan sosial seseorang juga baik. Mereka yang baik dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani akan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan yang relatif lebih tinggi. Apabila efisien kerja yang dilihat dari kemampuan fisik dan mental seseorang dalam keadaan baik maka hasil yang mereka dapat juga akan lebih besar. Teantunya hal ini akan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang baik dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan (Dores, 2015).

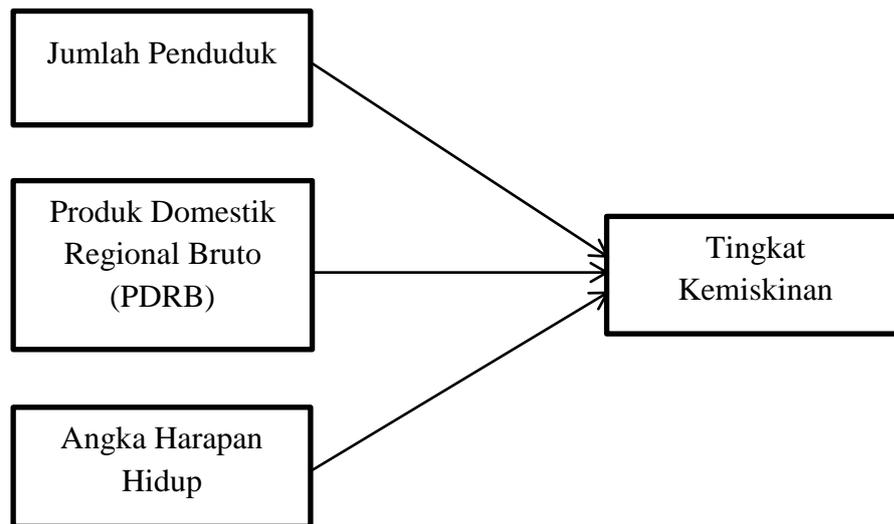
G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah
2. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

3. Diduga variabel angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

H. Kerangka Berfikir



Gambar 3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen dan pengangguran, PDRB, dan indeks pembangunan manusia digunakan sebagai variabel independen kabupaten/kota dalam kurun waktu 2010 sampai 2017.

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari kumpulan dokumen atau catatan yang mendukung dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2010 sampai 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : (1) Tingkat Kemiskinan, (2) Pengangguran, (3) PDRB dan (4) Indeks Pembangunan Manusia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan metode library research atau kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal, artikel internet dan tulisan ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan

pencatatan secara langsung berupa data time series dan cross section dari tahun 2010 sampai dengan 2017.

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan data yang digunakan pada penelitian ini, variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

a. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak sanggup menghidupi diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut, kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

b. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Jumlah Penduduk

Penduduk adalah seluruh individu yang berdomisili di suatu wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan menetap, (Silastri, 2017).

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

b. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang telah dihasilkan dari suatu kegiatan ekonomi di kabupaten dalam periode tahun yang sudah ditentukan. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh sebab itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh setiap daerah bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi di daerah tersebut.

B. Metode Analisis Data

a. Metode Data Panel

Salah satu komponen terpenting yang harus terpenuhi di dalam suatu penelitian adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menentukan metode apa yang paling sesuai dengan penelitian tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis hasil informasi kuantitatif, yaitu estimasi model regresi dengan menggunakan

data panel. Data panel adalah suatu gabungan data antara *time series* dan *cross section*. Bentuk model pada dasarnya adalah sebagai berikut (Basuki dan Yuliadi, 2015) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Dimana :

Y = Variabel dependen, yaitu kemiskinan

β = Koefisien

X1 = Variabel jumlah penduduk

X2 = Variabel PDRB

X3 = Variabel angka harapan hidup

e = *error terms*

t = periode waktu, 2010-2017

i = subyek di Provinsi Jawa Tengah

Terdapat beberapa model dalam regresi panel. Pertama adalah model komponen satu arah, yaitu model regresi panel yang hanya dipengaruhi oleh satu unit saja (unit *cross section* atau unit waktu). Kedua adalah model komponen dua arah, yaitu model regresi panel yang dipengaruhi oleh dua unit (*cross sectional*). Ada dua pendekatan yang digunakan untuk model regresi data panel, yaitu Common Effect Model adalah model yang tidak menggunakan pengaruh individu dan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* adalah dengan menggunakan pengaruh individu.

Keuntungan utama menggunakan data panel pada penelitian ekonomi yang pertama adalah peneliti mendapatkan jumlah pengamatan yang besar sehingga dapat meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), selain itu data mempunyai variabilitas yang besar dan dapat mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas dan hasil estimasi ekonometri akan efisien. Keuntungan kedua adalah data dibandingkan dengan data cross section atau time series, data panel dapat memberikan informasi yang lebih besar yang tidak dapat dijelaskan dengan data cross section maupun data time series saja (Hsiao, 1986 dalam Basuki dan Yuliadi, 2015).

C. Estimasi Model Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu :

a. Pooled Least Square (PLS) atau Metode Common

Metode Common adalah metode yang menggunakan data yang digabungkan kemudian diestimasi. Koefisiennya menggambarkan dampak variabel independen terhadap variabel dependen konstan untuk setiap *cross section* dan *time series*. Metode common adalah salah satu pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model common ini diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu dan metode common ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu. Metode ini bisa menggunakan

pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Basuki dan Yuliadi, 2015).

Adapun persamaan regresi dalam model common effect dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

i = menunjukkan cross section

t = menunjukkan periode waktunya

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Pada model ini diasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian, sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

c. *Random Effect Model*

Pada model ini data panel akan diestimasi dengan variabel gangguan yang mungkin saling berkaitan antar waktu dan individu. Model *Fixed Effect* ini perbedaan intersep akan diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga

disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

Widarjono (2013) menjelaskan bahwa tujuan variabel dummy pada model fixed effect adalah untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Tetapi, penambahan variabel dummy ini juga dapat menyebabkan derajat kebebasan menjadi berkurang dan efisiensi parameter juga akan berkurang. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) dikenal sebagai metode random effect.

D. Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji *Chow* ini digunakan untuk menentukan mana yang lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dimana hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Jika hipotesis nol (H_0) ditolak, maka model yang dipake dalam penelitian adalah *Fixed Effect*, dengan syarat apabila nilai probabilitas $F < (0,05)$.

b. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik yang digunakan dalam memilih model yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data

panel antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

Ho : *Random Effect*

Ha : *Fixed Effect*

Jika hipotesis nol (Ho) ditolak, maka model yang dipakai dalam penelitian adalah *Fixed Effect*, dengan syarat apabila nilai probabilitas *Cross Section Random* $< (0,05)$.

E. Uji Kualitas Instrumen dan Data

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat kesamaan varian pada semua pengamatan yang ada di model regresi. Heteroskedastisitas adalah salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier sederhana yang tidak efisien dan akurat, juga mengakibatkan penggunaan metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi koefisien regresi akan terganggu. Heteroskedastisitas dapat mengakibatkan pendugaan koefisien tidak efisien sehingga tidak mempunyai batasan minimum. Karena pendugaan koefisien dianggap efisien karena memiliki batasan-batasan minimum, sehingga ragam galat bersifat konstan. Salah satu usaha untuk mengatasi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara mentransformasikan variabel-variabelnya, baik secara variabel bebas, variabel tidak bebas maupun keduanya agar asumsi homokedastisitas dapat terpenuhi.

Dampak yang akan terjadi apabila terdapat keadaan heterokedastisitas adalah sulit untuk mengukur standar deviasi yang

sebenarnya, dapat menghasilkan standar deviasi yang terlalu lebar maupun terlalu sempit. Jadi bisa dikatakan tidak lulus uji Heteroskedastisitas dan mengalami masalah. Heteroskedastisitas terjadi pada data cross section, pada hal ini maka data panel cenderung termasuk ke ciri dari data *cross section* dibandingkan dengan data *time series* (Basuki, 2017).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan yang dimana antara variabel bebas dalam model regresi berganda akan diemukan adanya kolerasi atau hubungan antar satu dengan yang lain. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam regresi akan ditemukan adanya kolerasi tersebut. Apabila terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak signifikan dan mempunyai standar eror yang tinggi, dan semakin kecil kolerasi antara variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik.

Di dalam uji penyimpanan asumsi klasik akan untuk pendekatan multikolinearitas dilakukan dengan pendekatan R^2 dan signifikan dari variabel yang akan digunakan. Dan dapat dijelaskan dengan menganalisis data yang akan digunakan oleh setiap variabel dan hasil dari olah data tersebut, data yang akan digunakan dalam regresi ini diantaranya ada data *time series* dan data *cross section*. Namun multikolinearitas bisa terjadi pada data runtut waktu pada variabel yang akan digunakan. *Rule of Thumb* juga mengatakan apabila didapatkan R^2 yang tinggi sementara terdapat

sebagian besar atau semua variabel secara parsial tidak signifikan, maka akan diduga terjadi multikolinearitas pada model tersebut (Gujarati, 2006).

F. Uji Statistika

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah seberapa besar kemampuan semua variabel bebasnya dalam menjelaskan variasi dari variabel-variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R).

Penggunaan R Square ini juga sering mengalami permasalahan, yaitu bahwa nilainya R Square akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model tertentu. Hal ini akan menimbulkan permasalahan, karena jika yang di ingin memperoleh model dengan R tinggi, maka seorang peneliti secara langsung dapat menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung apakah variabel bebas tersebut ditambahkan berhubungan dengan variabel terikat atau variabel yang tidak terkait.

b. Uji Signifikan Variabel Secara Serempak (Uji F)

Uji F dapat disebut juga dengan Uji serentak adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel bebas secara keseluruhan dengan yang diperoleh. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik dan non signifikan.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan tabel F:F dalam excel, jika F hitung $>$ F tabel, (H_0 ditolak H_a diterima)

maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova. Model signifikan selama kolom signifikansi (%) , Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka model tidak signifikan.

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t_{hitung} .

Uji t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi-variasi variabel terikat (Ghozali, 2006).

Dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ (α) atau $T_{hitung} < T_{tabel}$ berarti hipotesa tidak terbukti maka H_0 diterima H_a ditolak, bila dilakukan uji secara parsial.
- b. Jika probabilitas (signifikansi) $< 0,05$ (α) atau $T_{hitung} > T_{tabel}$ berarti hipotesa terbukti maka H_0 ditolak dan H_a diterima, bila dilakukan uji secara parsial.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

a. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Wikipedia

Gambar 4 Peta Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau jawa. Provinsi Jawa Tengah terletak diantara dua provinsi besar, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Letak Provinsi Jawa Tengah berada di antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ lintang selatan dan antara $108^{\circ}30'$; bujur timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km sedangkan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan sekitar 1,70 persen dari luas Indonesia).

Berdasarkan posisi geografisnya provinsi ini berbatasan dengan :

Utara	: Laut Jawa
Selatan	: Provinsi DIY dan Samudera Hindia
Barat	: Provinsi Jawa Barat
Timur	: Provinsi Jawa Timur

b. Kondisi Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang dilihat dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2010	5.217.200	16.11
2011	5.256.000	16.21
2012	4.863.500	14.98
2013	4.811.300	14.44
2014	4.561.820	13.58
2015	4.577.000	13.58
2016	4.506.890	13.27
2017	4.450.720	13.01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tabel diatas, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2011 dimana pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 5.217.200 (ribu jiwa)/ 16.11% yang kemudian mengalami peningkatan sebesar 5.256.000 (ribu jiwa)/ 16.21% pada tahun 2011. Pada tahun berikutnya jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2012 sampai 2014. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin sebesar 4.863.500 (ribu jiwa)/ 14.98%, pada tahun 2013 sebesar 4.811.300 (ribu jiwa)/ 14.44%, dan pada tahun 2014 sebesar 4.561.820 (ribu jiwa)/ 13.58%. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 4.577.000 (ribu jiwa)/ 13.58%. pada tahun 2016 sampai 2017 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 4.506.890 (ribu jiwa)/ 13.27% dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 4.450.720 (ribu jiwa)/ 13.01%.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017 (ribu jiwa)

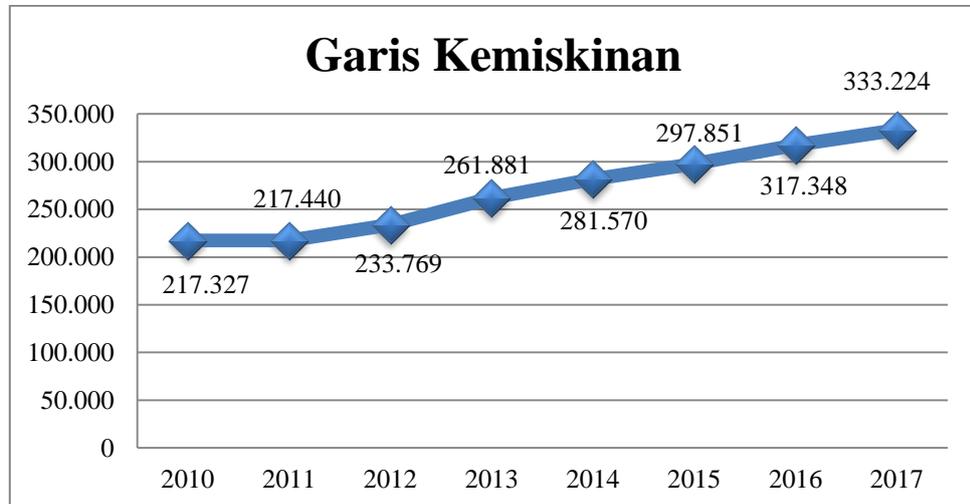
Wilayah	Tahun		
	2015	2016	2017
Kab. Cilacap	243.50	240.20	238.30
Kab. Banyumas	285.90	283.90	283.20
Kab. Purbalingga	176.50	171.80	171.90
Kab. Banjarnegara	165.40	158.20	156.80
Kab. Kebumen	241.90	235.90	233.40
Kab. Purworejo	101.20	99.10	98.60
Kab. Wonosobo	166.40	160.10	159.20
Kab. Magelang	162.40	158.90	157.20
Kab. Boyolali	120	117	116.40

Kab. Klaten	172.30	168	165
Kab. Sukoharjo	79.90	78.90	76.70
Kab. Wonogiri	123	124.80	123
Kab. Karanganyar	106.40	107.70	106.80
Kab. Sragen	130.40	126.80	124
Kab. Grobogan	184.50	184.10	181
Kab. Blora	115	113.90	111.90
Kab. Rembang	119.10	115.50	115.20
Kab. Pati	147.10	144.20	141.70
Kab. Kudus	64.10	64.20	64.40
Kab. Jepara	100.60	100.30	99
Kab. Demak	160.90	158.80	152.60
Kab. Semarang	81.20	80.70	79.70
Kab. Temanggung	87.50	87.10	86.80
Kab. Kendal	109.30	107.80	106.10
Kab. Batang	83.50	82.60	81.50
Kab. Pekalongan	112.10	113.30	111.60
Kab. Pemalang	235.50	227.10	225
Kab. Tegal	143.50	144.20	141.80
Kab. Brebes	352	348	343.50
Kota Magelang	10.90	10.60	10.60
Kota Surakarta	55.70	55.90	54.90
Kota Salatiga	10.60	9.70	9.60
Kota Semarang	84.30	83.60	80.90
Kota Pekalongan	24.10	23.60	22.50
Kota Tegal	20.30	20.30	20.10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 343.50 ribu jiwa. Sedangkan angka kemiskinan terendah berada di Kota Salatiga dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 9.60 ribu jiwa.

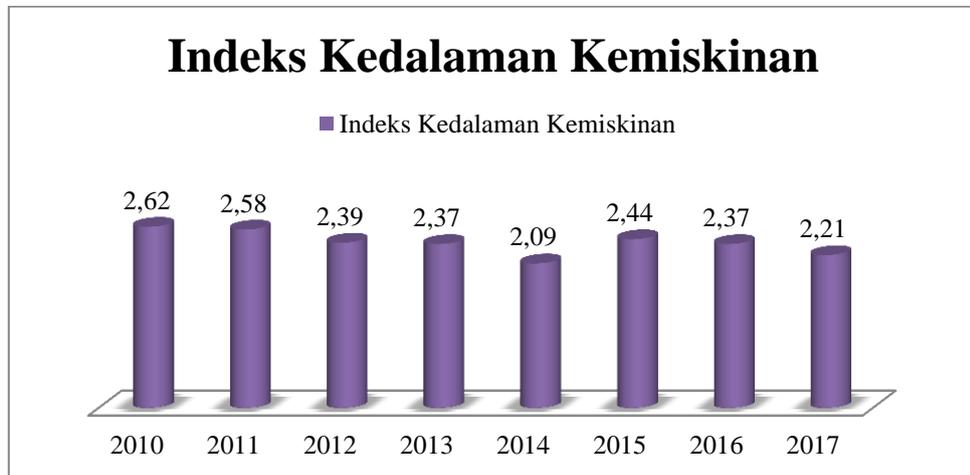
Grafik 1
Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2019

Garis kemiskinan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan besaran pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta kebutuhan non-makanan atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Berdasarkan dari grafik diatas, garis kemiskinan provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Pada tahun 2010 garis kemiskinan provinsi Jawa Tengah adalah Rp 217.327, pada tahun 2011 sebesar Rp 217.440, tahun 2012 sebesar Rp 233.769, tahun 2013 sebesar Rp 261. 881, tahun 2014 sebesar Rp 281.570. tahun 2015 sebesar Rp 297.851, tahun 2016 sebesar Rp 317.348, dan pada tahun 2017 sebesar Rp 333.224.

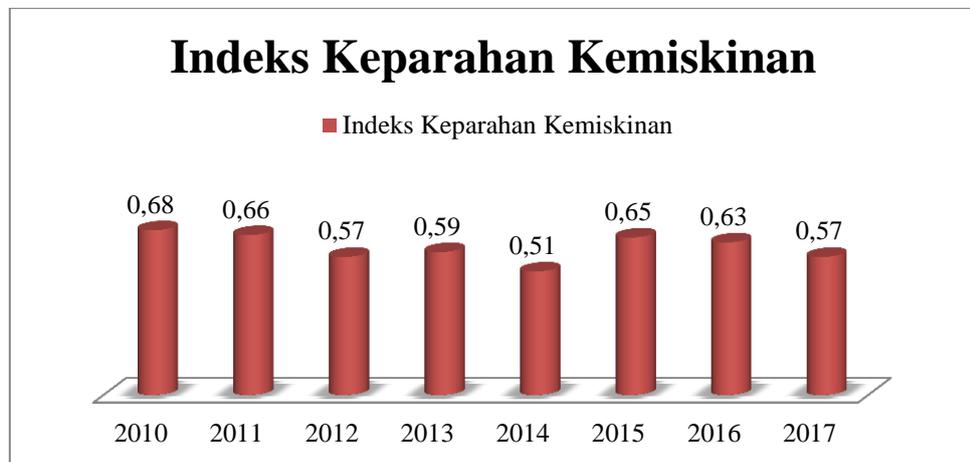
Grafik 2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2019

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019). Berdasarkan grafik diatas, indeks kedalaman kemiskinan provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi pada kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2017. Pada tahun 2010 indeks kedalaman kemiskinan provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 2,62% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 sampai 2014. Tahun 2011 indeks kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 2,58%, tahun 2012 sebesar 2,39%, tahun 2013 sebesar 2,37%, dan pada tahun 2014 sebesar 2,09%. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 2,44% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan tahun 2017 masing masing sebesar 2,37% dan 2,21%.

Grafik 3
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2019

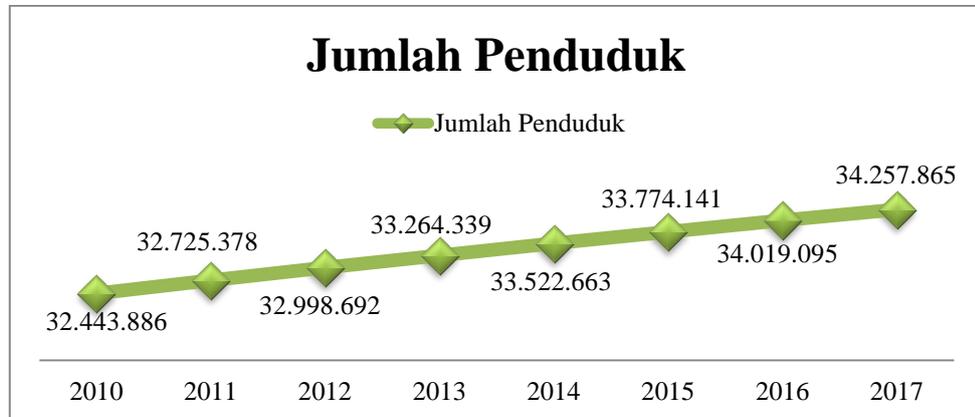
Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indkes, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2019). Berdasarkan grafik diatas, indeks keparahan kemiskinan provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sampai tahun 2012 indeks keparahan kemiskinan provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2010 sebesar 0,68%, tahun 2011 sebesar 0,66%, tahun 2012 sebesar 0,57%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 0,59%. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,51%, tahun 2015 sebesar 0,65%, tahun 2016 sebesar 0,63% dan 0,57% di tahun 2017.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah semua orang yang menetap di suatu daerah selama sebulan atau lebih dan atau mereka yang menetap kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2019). Jumlah penduduk yang besar dilihat dari sisi permintaan merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, dengan kata lain merupakan faktor pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sedangkan jumlah penduduk yang besar dilihat dari sisi penawaran merupakan faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang diperlukan dan banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun disuatu wilayah (Robinson, 2012).

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 34.257.865 jiwa yang terdiri atas 16.988.093 jiwa penduduk laki-laki dan 17.269.772 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Jawa Tengah tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,71 persen. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2017, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,37. Berikut ini akan dipaparkan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut :

Grafik 4
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan grafik 4 diatas jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan pada tahun 2010 sampai tahun 2017. Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Jawa Tengah sebesar 32.443.886 jiwa, tahun 2011 sebesar 32.725.378 jiwa, tahun 2012 sebesar 32.998.692 jiwa, tahun 2013 sebesar 33.264.339 jiwa, tahun 2014 sebesar 33.522.663, tahun 2015 sebesar 33.774.141 jiwa, tahun 2016 sebesar 34.019.095 jiwa, dan pada tahun 2017 sebesar 34.257.865 jiwa.

d. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai

tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut (Jawa Tengah Dalam Angka 2018).

PDRB adalah total penjumlahan dari barang dan jasa yang diproduksi pada daerah tertentu dan pada waktu tertentu biasanya satu tahun. Apabila suatu daerah mempunyai nilai PDRB yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi dan mengalami kemajuan dalam perekonomian. Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Tabel 5 Produk Domestik Bruto Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017 (juta rupiah)

Wilayah	Tahun		
	2015	2016	2017
Kab. Cilacap	88.357.606,68	92.830.362,20	95.103.846,69
Kab. Banyumas	31.164.876,40	33.051.046,65	35.147.313,30
Kab. Purbalingga	14.130.612,26	14.806.549,63	15.564.284,43
Kab. Banjarnegara	12.266.046,35	12.929.657,38	13.630.385,44
Kab. Kebumen	16.115.554,01	16.916.219,56	17.743.915,15
Kab. Purworejo	10.862.645,98	11.418.355,22	12.005.095,39
Kab. Wonosobo	11.334.080,04	11.915.998,92	12.292.804,84
Kab. Magelang	18.864.651,97	19.876.744,24	20.882.801,03
Kab. Boyolali	18.170.383,95	19.132.556,30	20.188.699,71
Kab. Klaten	22.558.976,15	23.717.931,02	24.920.302,86

Kab. Sukoharjo	21.612.078,19	22.845.982,81	24.152.939,48
Kab. Wonogiri	16.977.198,56	17.865.345,42	18.788.397,76
Kab. Karanganyar	21.286.287,14	22.428.793,80	23.665.952,05
Kab. Sragen	21.390.871,20	22.618.321,66	23.933.252,17
Kab. Grobogan	15.962.619,43	16.674.629,70	17.617.254,27
Kab. Blora	12.882.587,70	15.913.432,03	16.843.360,54
Kab. Rembang	10.850.269,20	11.418.008,73	12.123.468,84
Kab. Pati	24.770.325,07	26.121.955,34	27.532.168,10
Kab. Kudus	65.029.937,50	66.669.085,40	68.649.053,55
Kab. Jepara	17.210.365,92	18.074.134,88	19.001.040,83
Kab. Demak	14.912.999,60	15.666.347,56	16.537.579,21
Kab. Semarang	28.768.327,30	30.283.032,61	31.939.250,10
Kab. Temanggung	12.489.394,54	13.110.745,64	13.724.464,81
Kab. Kendal	24.762.325,36	26.131.137,07	27.586.097,11
Kab. Batang	12.328.239,23	12.942.691,09	13.627.279,81
Kab. Pekalongan	13.234.564,04	13.917.701,83	14.652.178,71
Kab. Pemalang	14.673.696,23	15.463.800,55	16.297.654,01
Kab. Tegal	19.999.475,45	21.182.917,23	22.322.100,13
Kab. Brebes	26.572.834,89	27.921.986,33	29.450.228,81
Kota Magelang	5.247.341,27	5.518.684,53	5.804.312,00
Kota Surakarta	28.453.493,87	29.966.373,01	31.562.980,46
Kota Salatiga	7.759.181,62	8.163.940,76	8.589.009,54
Kota Semarang	109.110.689,6 1	115.485.429,48	122.000.440,3 8
Kota Pekalongan	6.043.095,73	6.367.272,96	6.706.278,70
Kota Tegal	8.953.879,56	9.440.530,97	9.955.592,98

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah dengan nilai PDRB tertinggi pada tahun 2017 adalah Kota Semarang sebesar 122.000.440,38. Sedangkan wilayah dengan nilai PDRB terendah adalah Kota Magelang sebesar 5.804.312,00 pada tahun 2017.

a. Angka Harapan Hidup

Menurut BPS (2019) Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil

mencapai umur tertentu, pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup di suatu wilayah setiap tahunnya diharapkan akan selalu meningkat secara signifikan. Tidak banyak yang tau terkait pentingnya dengan angka harapan hidup itu sendiri, terutama pada kalangan pendidikan yang relatif rendah. Pendidikan adalah cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara ekonomi dan sosial, serta salah satu cara mengatasi kesenjangan ekonomi dalam mewujudkan tercapainya kesetaraan dan hidup makmur. Pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan ekonomi yang mendasar. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat. Berikut akan dipaparkan angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut :

Grafik 5
Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan grafik diatas, angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 angka harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah adalah 72,72 tahun, tahun 2011 adalah 72,91 tahun, tahun 2012 adalah 73,09 tahun, tahun 2013 adalah 73,28 tahun, tahun 2014 adalah 73,88 tahun, tahun 2015 adalah 73,96 tahun, tahun 2016 adalah 74,02 tahun, dan pada tahun 2017 adalah 74,08 tahun.

BAB V

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan melakukan analisis model Fixed Effect beserta pengujian hipotesisnya yang meliputi uji serempak (uji-F), uji signifikansi parameter individual (Uji T), dan koefisien determinasi (R^2). Sebelum kita menentukan apakah model terbaik yang digunakan Fixed Effect atau Random Effect terlebih dahulu di uji dengan menggunakan uji chow dan uji haussman.

A. Uji Kaulitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini akan terjadi ketidaksamaan variasi dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah apabila tidak terjadi homokedastisitas atau tidak heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas lebih sering terjadi pada data cross section (Ghozali 2005).

Salah satu faktor yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam model regresi linear sederhana adalah heteroskedastisitas. Selain itu dapat menyebabkan kemungkinan gangguan dalam mengestimasi koefisien regresi. Salah satu cara agar dapat mengatasi heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan cara mentransformasikan variabel bebas dan variabel tidak bebas atau keduanya agar asumsi homokedastisitas dapat terpenuhi. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coef.	Std. Error	t-statistic	Prob
C	100746.1	83913.00	1.200.602	0.2309
JP	-0.001503	0.004293	-0.350153	0.7265
PDRB	0.000316	0.000048	0.658070	0.5110
AHH	-1.270.785	1.079.421	-1.177.284	0.2401

Sumber : Output *Eviews 8*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel tidak signifikan pada level 5% atau $>0,05$ hal ini menunjukkan bahwa model penelitian bebas dari masalah heteroskedastisitas. Pada pengujian ini variabel dependen diganti menjadi RESID. Hal ini dilakukan untuk pengujian heteroskedastisitas pada model penelitian data panel karena model data panel lebih cenderung bersifat *cross section* daripada *time series*.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan karena terdapat hubungan yang erat antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dalam persamaan. Mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai R^2 , F hitung serta t hitung.

Adapun indikasi-indikasi terjadinya multikolinearitas (Gujarati, 2010: 251) adalah sebagai berikut :

- a) Jika ditemukan R^2 yang tinggi dan nilai F statistik yang signifikan tetapi sebagian besar nilai t statistik tidak signifikan.
- b) Korelasi sederhana yang relatif tinggi (0,8 atau lebih) antara satu atau lebih pasang variabel bebas. Jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

	K	JP	PDRB	AHH
K	1.000000	0.787816	0.126141	-0.662273
JP	0.787816	1.000000	0.532796	-0.394084
PDRB	0.126141	0.532796	1.000000	0.156005
AHH	-0.662273	-0.394084	0.156005	1.000000

Sumber : Output Eviews 8

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil uji mulikolinearitas tidak menunjukkan adanya korelasi matriks atau correlation matrix (lebih besar dari 0,85) sehingga penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

B. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain Common Fixed Effect, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Dari ketiga pendekatan tersebut, akan dipilih satu pendekatan yang paling sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan pengujian statistik.

Ada beberapa pengujian statistik dalam regresi data panel, yang pertama adalah Uji Chow. Uji chow yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan model Fixed Effect atau Common Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengujian statistik yang kedua adalah Uji Hausman. Uji hausman adalah pengujian statistik yang digunakan untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Berikut adalah hasil pengujian statistik untuk menentukan model terbaik :

1. Uji Chow

Kriteria dalam Uji Chow ini adalah apabila hasil probabilitas kurang dari alpha 5% (0,05) maka H_0 (hipotesis nol) ditolak. Sehingga model yang digunakan dalam penelitian adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 8
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	202.404.331	(34,242)	0.0000
Cross-section Chi-Squared	947.030.404	34	0.0000

Sumber : Output *Eviews 8*

Berdasarkan hasil Uji Chow diatas dapat dilihat bahwa probabilitas cross-section F adalah $0,0000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga model yang paling tepat untuk mengestimasi penelitian ini ada model *Fixed Effect*.

2. Uji Hausman

Pengujian statistik selanjutnya adalah Uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Dalam Uji Hausman apabila nilai probabilitas $<0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model yang paling sesuai untuk mengestimasi penelitian ini adalah model Fixed Effect. Berikut hasil dari Uji Hausman, sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section Random	93.896.697	3	0.0000

Sumber : Output *Eviews 8*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas cross-section random adalah 0,0000 yang berarti $<0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Itu berarti bahwa model Fixed Effect lebih sesuai digunakan untuk mengestimasi penelitian ini dibandingkan dengan model Random Effect.

C. Analisis Model Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Berikut akan dipaparkan hasil dari regresi data panel menggunakan *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*, sebagai berikut :

Tabel 10
Hasil Regresi Data Panel

Variabel Dependen : Kemiskinan?	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta	957980.8	3068062.	2638360.
Standar Error	94352.73	203543.5	152224.1
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0000
JP?	0.153515	-0.031289	0.029253
Standar Error	0.007211	0.015524	0.011455
Probabilitas	0.0000	0.0450	0.0112
PDRB?	-0.000963	-0.000365	-0.000633
Standar Error	0.000135	0.000163	0.000149
Probabilitas	0.0000	0.0264	0.0000
AHH	-12725.89	-38896.96	-33818.19
Standar Error	1232.001	2.776.711	2.030.794
Probabilitas	0.0000	0.0000	0.0000
R2	0.816228	0.993757	0.563944
F statistik	408.6212	1.041.138	1.189.821
Probabilitas	0.000000	0.000000	0.000000
Durbin-Watson Stat	0.067194	1.128.348	0.729487

Sumber : Output *Eviews 8*

Berdasarkan uji spesifikasi yang telah dilakukan menggunakan uji chow dan uji hausman, hasil dari kedua pengujian tersebut disarankan untuk menggunakan model *Fixed Effect*. Dan dari uji pemilihan model terbaik pada tabel 12 hasil regresi data panel juga menunjukkan bahwa model terbaik dalam mengestimasi data panel adalah *Fixed Effect*. Hal ini disebabkan karena nilai probabilitas variabel independen dari *Fixed Effect* lebih signifikan dibanding dengan *Random Effect* dan *Common Effect*.

D. Hasil Estimasi Model Data Panel

Menurut uji spesifikasi dan pemilihan model terbaik yang telah dilakukan maka model yang digunakan dalam penelitian adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dalam uji asumsi klasik, jadi hasil yang diperoleh setelah estimasi konsisten dan tidak bias. Berikut akan disajikan hasil estimasi data dengan jumlah observasi 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2017.

Tabel 11
Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variabel Dependen : Kemiskinan?	Model Fixed Effect
Konstanta	3068062.
Standar Error	203543.5
Probabilitas	0.0000
JP?	-0.031289
Standar Error	0.015524
Probabilitas	0.0450
PDRB?	-0.000365
Standar Error	0.000163
Probabilitas	0.0264
AHH	-38896.96
Standar Error	2.776.711
Probabilitas	0.0000
R2	0.993757
F statistik	1.041.138
Probabilitas	0.000000
Durbin-Watson Stat	1.128.348

Sumber : Output *Eviews 8*

Dari hasil Estimasi *Fixed Effect Model* diatas maka dapat dibuat model analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan sebagai berikut :

$$K = \beta_0 + \beta_1*JP + \beta_2*PDRB + \beta_3*AHH + e$$

Dimana :

K = Tingkat Kemiskinan

JP = Jumlah Penduduk

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

AHH = Angka Harapan Hidup

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Parameter

e = *Error*

dimana dari hasil regresi diperoleh hasil sebagai berikut :

$$K = 3068062. - 0.031289*JP - 0.000365*PDRB - 38896.96*AHH + e$$

β_0 = Nilai 3068062 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (JP, PDRB, AHH) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan sebesar 3068062

β_1 = Nilai dari 0,031289 dapat diartikan bahwa ketika jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1 jiwa maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3 jiwa

β_2 = Nilai dari 0,000365 dapat diartikan bahwa ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami kenaikan sebesar 1 juta rupiah maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,0365 persen

β_3 = Nilai 38896,96 dapat diartikan bahwa ketika Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami kenaikan sebesar 1 tahun maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3.889 jiwa

Dari tabel 13 hasil regresi Fixed Effect Model maka dapat dibentuk model analisis data panel mengenai determinan permintaan tenaga kerja di 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2017 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 K_CILACAP = & 104883.0 \quad (\text{efek wilayah}) + 3068062. - \\
 & 0.031289*JP_CILACAP - 0.000365*PDRB_CILACAP - \\
 & 38896.96*AHH_CILACAP
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 K_BANYUMAS = & 128485.4 \quad (\text{efek wilayah}) + 3068062. - \\
 & 0.031289*JP_BANYUMAS - 0.000365*PDRB_BANYUMAS - \\
 & 38896.96*AHH_BANYUMAS
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 K_PURBALINGGA = & -22807.57 \quad (\text{efek wilayah}) + 3068062. - \\
 & 0.031289*JP_PURBALINGGA - \\
 & 0.000365*PDRB_PURBALINGGA - 38896.96*AHH_PURBALINGGA
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 K_BANJARNEGARA = & -16057.06 \quad (\text{efek wilayah}) + 3068062. - \\
 & 0.031289*JP_BANJARNEGARA - \\
 & 0.000365*PDRB_BANJARNEGARA - \\
 & 38896.96*AHH_BANJARNEGARA
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 K_KEBUMEN = & 49781.05 \quad (\text{efek wilayah}) + 3068062. - \\
 & 0.031289*JP_KEBUMEN - 0.000365*PDRB_KEBUMEN - \\
 & 38896.96*AHH_KEBUMEN
 \end{aligned}$$

K_PURWOREJO = -60959.01 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_PURWOREJO - 0.000365*PDRB_PURWOREJO -
38896.96*AHH_PURWOREJO

K_WONOSOBO = -116796.5 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_WONOSOBO - 0.000365*PDRB_WONOSOBO -
38896.96*AHH_WONOSOBO

K_MAGELANG = -10334.93 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_MAGELANG - 0.000365*PDRB_MAGELANG -
38896.96*AHH_MAGELANG

K_BOYOLALI = 31942.13 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_BOYOLALI - 0.000365*PDRB_BOYOLALI -
38896.96*AHH_BOYOLALI

K_KLATEN = 131752.8 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_KLATEN - 0.000365*PDRB_KLATEN -
38896.96*AHH_KLATEN

K_SUKOHARJO = 61206.02 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_SUKOHARJO - 0.000365*PDRB_SUKOHARJO -
38896.96*AHH_SUKOHARJO

K_WONOGIRI = 47056.91 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_WONOGIRI- 0.000365*PDRB_WONOGIRI -
38896.96*AHH_WONOGIRI

K_KARANGANYAR = 67123.13 (efek wilayah) + 3068062. -

0.031289*JP_KARANGANYAR-

0.000365*PDRB_KARANGANYAR -

38896.96*AHH_KARANGANYAR

K_SRAGEN = 32326.66 (efek wilayah) + 3068062. -

0.031289*JP_SRAGEN- 0.000365*PDRB_SRAGEN -

38896.96*AHH_SRAGEN

K_GROBOGAN = 62590.85 (efek wilayah) + 3068062. -

0.031289*JP_GROBOGAN - 0.000365*PDRB_GROBOGAN -

38896.96*AHH_GROBOGAN

K_BLORA = -45636.50 (efek wilayah) + 3068062. -

0.031289*JP_BLORA - 0.000365*PDRB_BLORA -

38896.96*AHH_BLORA

K_REMBANG = -34966.64 (efek wilayah) + 3068062. -

0.031289*JP_REMBANG - 0.000365*PDRB_REMBANG -

38896.96*AHH_REMBANG

K_PATI = 70397.10 (efek wilayah) + 3068062. -

0.031289*JP_PATI - 0.000365*PDRB_PATI -

38896.96*AHH_PATI

K_KUDUS = 18663.12 (efek wiayah) + 3068062. -
 0.031289*JP_KUDUS - 0.000365*PDRB_KUDUS -
 38896.96*AHH_KUDUS

K_JEPARA = 20631.67 (efek wilayah) + 3068062. -
 0.031289*JP_JEPARA - 0.000365*PDRB_JEPARA -
 38896.96*AHH_JEPARA

K_DEMAK = 67302.06 (efek wilayah) + 3068062. -
 0.031289*JP_DEMAK - 0.000365*PDRB_DEMAK -
 38896.96*AHH_DEMAK

K_SEMARANG = -5720.913 (efek wilayah) + 3068062. -
 0.031289*JP_SEMARANG - 0.000365*PDRB_SEMARANG -
 38896.96*AHH_SEMARANG

K_TEMANGGUNG = -21447.82 (efek wilayah) + 3068062. -
 0.031289*JP_TEMANGGUNG - 0.000365*PDRB_TEMANGGUNG -
 - 38896.96*AHH_TEMANGGUNG

K_KENDAL = -32149.84 (efek wilayah) + 3068062. -
 0.031289*JP_KENDAL - 0.000365*PDRB_KENDAL -
 38896.96*AHH_KENDAL

K_BATANG = -60002.44 (efek wilayah) + 3068062. -
 0.031289*JP_BATANG - 0.000365*PDRB_BATANG -
 38896.96*AHH_BATANG

K_PEKALONGAN = -70484.33 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_PEKALONGAN - 0.000365*PDRB_PEKALONGAN -
38896.96*AHH_PEKALONGAN

K_PEMALANG = 42464.03 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_PEMALANG - 0.000365*PDRB_PEMALANG -
38896.96*AHH_PEMALANG

K_TEGAL = -113661.4 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_TEGAL - 0.000365*PDRB_TEGAL -
38896.96*AHH_TEGAL

K_BREBES = 3452.009 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_BREBES - 0.000365*PDRB_BREBES -
38896.96*AHH_BREBES

K_KMAGELANG = -73934.88 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_KMAGELANG - 0.000365*PDRB_KMAGELANG -
38896.96*AHH_KMAGELANG

K_KSURAKARTA = 10704.97 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_KSURAKARTA - 0.000365*PDRB_KSURAKARTA -
38896.96*AHH_KSURAKARTA

K_KSALATIGA = -66659.27 (efek wilayah) + 3068062. -
0.031289*JP_KSALATIGA - 0.000365*PDRB_KSALATIGA -
38896.96*AHH_KSALATIGA

$$K_KSEMARANG = 106737.9 \text{ (efek wilayah) } + 3068062. - \\ 0.031289*JP_KSEMARANG - 0.000365*PDRB_KSEMARANG- \\ 38896.96*AHH_KSEMARANG$$

$$K_KPEKALONGAN = -151232.9 \text{ (efek wilayah) } + 3068062. - \\ 0.031289*JP_KPEKALONGAN - 0.000365*PDRB_KPEKALONGAN- \\ 38896.96*AHH_KPEKALONGAN$$

$$K_KTEGAL = -154648.7 \text{ (efek wilayah) } + 3068062. - \\ 0.031289*JP_KTEGAL - 0.000365*PDRB_KTEGAL - \\ 38896.96*AHH_KTEGAL$$

Dari estimasi diatas terlihat bahwa pengaruh variabel *cross section* berbeda di setiap kabupaten/ kota di provinsi Jawa Tengah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 18 kabupaten/ kota yang memilii pengaruh *cross section* bernilai positif, diantaranya Kabupaten Cilacap dengan nilai koefisien 104883.0, Kabupaten Banyumas dengan nilai koefisien 128485.4, Kabupaten Kebumen dengan nilai koefisien 49781.05, Kabupaten Boyolali dengan nilai koefisien 31942.13, Kabupaten Klaten dengan nilai koefisien 131752.8, Kabupaten Sukoharjo dengan nilai koefisien 61206.02, Kabupaten Wonogiri dengan nilai koefisien 47056.91, Kabupaten Karanganyar dengan nilai koefisien 67123.13, Kabupaten Sragen dengan nilai koefisien 32326.66, Kabupaten Grobogan dengan nilai koefisien 62590.85, Kabupaten Pati dengan niali koefisien 70397.10, Kabupaten Kudus dengan nilai koefisien 18663.12,

Kabupaten Jepara dengan nilai koefisien 20631.67, kemudian Kabupaten Demak dengan nilai koefisien 67302.06, Kabupaten Pemalang dengan nilai koefisien 42464.03, Kabupaten Brebes dengan nilai koefisien 3452.009, Kota Surakarta dengan nilai koefisien 10704.97, dan Kota Semarang dengan nilai koefisien 106737.9.

Sedangkan 17 kabupaten/ kota yang memiliki pengaruh *cross section* bernilai negatif adalah Kabupaten Purbalingga dengan nilai koefisien -22807.57, Kabupaten Banjarnegara dengan nilai koefisien -16057.06, Kabupaten Purworejo dengan nilai koefisien -60959.01, Kabupaten Wonosobo dengan nilai koefisien -116796.5, Kabupaten Magelang dengan nilai koefisien -10334.93, Kabupaten Blora dengan nilai koefisien -45636.50, Kabupaten Rembang dengan nilai koefisien -34966.64, Kabupaten Semarang dengan nilai koefisien -5720.913, Kabupaten Temanggung dengan nilai koefisien -21447.82, Kabupaten Kendal dengan nilai koefisien -32149.84, Kabupaten Batang dengan nilai koefisien -60002.44, Kabupaten Pekalongan dengan nilai koefisien -70484.33, Kabupaten Tegal dengan nilai koefisien -113661.4, Kota Magelang dengan nilai koefisien -73934.88, Kota Salatiga dengan nilai koefisien -66659.27, Kota Pekalongan dengan nilai koefisien -151232.9, dan Kota Tegal dengan nilai koefisien -154648.7.

Nilai *cross section* menentukan seberapa besar pengaruh atau efek wilayah terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/ kota yang

memiliki pengaruh tertinggi adalah Kabupaten Klaten dengan nilai koefisien 131752.8. Sedangkan kabupaten/ kota yang memiliki pengaruh terkecil adalah Kota Tegal dengan nilai koefisien -154648.7. Penambahan efek waktu dalam model analisis memberikan pengaruh yang berbeda setiap tahunnya terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien variabel waktu yang tidak sama disetiap tahunnya.

E. Uji Statistik dan Pengujian Hipotesa

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian adalah uji determinasi (R^2), Uji Signifikansi bersama (uji F), serta Uji Signifikansi Parameter individual (uji T). Berikut adalah interpretasi dari masing-masing uji statistik :

Tabel 12
Estimasi *Fixed Effect*

R-squared	0.993757	Mean dependent var	136584.3
Adjusted R-squared	0.992803	S.D. dependent var	78897.89
S.E. of regression	6693.488	Akaike info criterion	20.58123
Sum squared resid	1.08E+10	Schwarz criterion	21.07453
Log likelihood	-2843.373	Hannan-Quinn criter	20.77910
F-statistic	1041.138	Durbin-Watson stat	1-128348
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output *Eviews 8*

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai

(R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen cukup terbatas, nilai yang mendekati satu variabel berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk variabel dependen.

Hasil regresi dari pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan Angka Harapan Hidup terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2010-2017 yang terlihat pada tabel 10 diperoleh R^2 sebesar 0.993757 persen variabel-variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten/ kota Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Penduduk, PDRB, dan Angka Harapan Hidup. Sedangkan 0,6243 persen dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini.

2. Uji F-statistik

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen (Jumlah Penduduk, PDRB, Angka Harapan Hidup) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Dapat dilihat pada tabel 10, nilai probabilitas F-statistik yaitu sebesar 0,000000 (signifikan pada 5 persen) artinya secara simultan (bersama-sama) variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan agar dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen untuk menerangkan variabel

dependen. Apabila probabilitasnya $<0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang terdapat di dalam model. Sebaliknya apabila nilai probabilitasnya $>5\%$ maka H_0 tidak ditolak, artinya variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji.

Berikut merupakan hasil uji t-statistik yang dilakukan menggunakan model *Fixed Effect* :

Tabel 13
Hasil Uji t-statistik

Variabel	Coef.	t-statistik	Prob.	Sig.
JP	-0.031289	-2.015.545	0.0450	5%
PDRB	-0.000365	-2.234.305	0.0264	5%
AHH	-38896.96	-1.400.829	0.0000	5%

Sumber : *Output Eviews 8*

a. Pengujian variabel Jumlah Penduduk (JP)

Berdasarkan tabel 11 hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel jumlah penduduk sebesar -2.015.545 dengan nilai probabilitas 0,0450 yang berarti signifikan pada 5%. Jadi dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. selain itu, koefisien regresi pada variabel jumlah penduduk adalah sebesar -0.031289 artinya apabila jumlah penduduk naik sebesar 1 jiwa maka kemiskinan akan turun sebesar 3 jiwa.

b. Pengujian variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Berdasarkan tabel 11 hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel PDRB sebesar -2.234.305 dan memiliki probabilitas

sebesar 0.0264 yang berarti signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, koefisien regresi pada variabel PDRB adalah sebesar -0.000365 yang artinya apabila PDRB naik sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000365

c. Pengujian variabel AHH (Angka Harapan Hidup)

Berdasarkan tabel 11 hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel AHH sebesar -1.400.829 dan memiliki probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti signifikan pada $\alpha = 5\%$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel AHH berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, koefisien regresi pada variabel AHH adalah sebesar -38896.96 yang artinya apabila AHH naik sebesar 1 tahun maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3.889 jiwa

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dari hasil penelitian diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil peneltian diatas, variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sebesar -0.031289, artinya jika ada jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1 jiwa maka kemiskinan akan turun sebesar 3 jiwa. Hal ini dapat dijelaskan

karena penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang besar sebenarnya adalah pasar potensial untuk meningkatkan produksi berbagai macam barang dan jasa sehingga akan menciptakan kegiatan ekonomi yang menguntungkan semua pihak yang kemudian biaya produksi akan turun dan menambah sumber pasokan atau penawaran akan tenaga kerja murah dalam jumlah yang besar sehingga pada akhirnya akan merangsang output atau produksi agregat lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang akan menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang berakibat positif apabila pertumbuhannya dapat memungkinkan bertambahnya tenaga kerja yang mampu mendorong sektor produksi sehingga dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dan pada akhirnya juga dapat menurunkan kemiskinan. Di Jawa Tengah lebih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan data tahun 2017 jumlah penduduk produktif Jawa Tengah telah mencapai 67,64% atau angka rasio ketergantungan sebesar 47,8% sehingga kesempatan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup serta menurunkan kemiskinan akan terbuka lebar. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2017 ditolak/ gagal terbukti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi, 2016) dalam penelitiannya “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak” mengungkapkan bahwa jumlah penduduk menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak, yang artinya apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka akan menurunkan kemiskinan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Usman dan Diramita, 2018) dalam penelitiannya “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau” mengungkapkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Menurut peneliti hal tersebut disebabkan karena penduduk yang berada di Provinsi Kepulauan Riau lebih didominasi oleh penduduk usia produktif sehingga kesempatan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup serta menurunkan kemiskinan akan terbuka lebar.

2. Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sebesar -0.000365, artinya apabila ada kenaikan PDRB sebesar 1 juta rupiah maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,000365 persen. Hubungan PDRB dengan kemiskinan berkaitan erat.

Menurut Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, namun harus tetap diperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dengan turunnya pendapatan masyarakat tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Berdasarkan pendapat diatas penelitian ini sesuai dengan teori yang ada karena dari hasil yang didapat setiap kenaikan PDRB sebesar 1 persen maka dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin. Nilai PDRB di Jawa Tengah pada tahun 2010-2017 mampu untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah karena nilai PDRB yang semakin meningkat setiap tahunnya dan menyebar di semua golongan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga hipotesis diterima/ terbukti.

Menurut Thamrin (2001) mengatakan bahwa apabila PDRB suatu daerah meningkat, maka potensi sumber pendapatan daerah tersebut juga meningkat karena pendapatan masyarakat di daerah tersebut juga semakin besar. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Siti Mu'amala, 2017) dalam penelitiannya "Determinan Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 2008-2014)" mengungkapkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Pengaruh negatif PDRB terhadap kemiskinan dapat dijelaskan, yaitu ketika pertumbuhan output suatu daerah meningkat hal ini berarti terjadi kenaikan produksi dimana peningkatan produksi akan memperluas lapangan pekerjaan, sehingga menurunkan tingkat pengangguran, penurunan tingkat pengangguran menandakan bahwa banyaknya penduduk yang terserap dalam dunia kerja sehingga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di DIY.

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Dama dkk, 2016) dalam penelitiannya "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014)" mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai peranan

paling penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Manado khususnya dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Manado.

3. Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan penelitian diatas, variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sebesar -38896.96, artinya apabila ada kenaikan Angka Harapan Hidup sebesar 1 tahun maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 3.889 jiwa. Hal ini dapat dijelaskan yaitu perbaikan kesehatan penduduk dapat meningkatkan produktifitas masyarakat terutama mereka yang bekerja. Apabila efisien kerja yang dilihat dari kemampuan fisik dan mental mereka mengalami kenaikan maka pendapatan yang mereka dapatkan juga akan mengalami peningkatan. Hal ini nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat yang semakin berkualitas ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH). Tingkat produktivitas masyarakat yang meningkat dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun (Anggadini, 2015). Hal ini dapat diartikan bahwa apabila kualitas kesehatan masyarakat Jawa Tengah meningkat, maka Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah diyakini akan menurun. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga bahwa angka

harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga hipotesis diterima/ terbukti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Edi Dores, 2015) dalam penelitiannya “Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatra Barat” mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatra Barat, angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatra Barat. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi angka harapan hidup maka akan berdampak terhadap semakin rendah pula jumlah penduduk miskin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh angka harapan hidup.

Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Fima Anggradini, 2015) dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013” mengungkapkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Tengah. Angka harapan hidup semakin tinggi, tingkat kesehatan masyarakat semakin berkualitas.

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan pada 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2010-2017 ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Angka Harapan Hidup terhadap Kemiskinan di Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan regresi data panel model fixed effect maka berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari ketiga variabel independen yang terdiri dari Jumlah Prnduduk, Produk, Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa 99,3757% dari variabel independen yang digunakan mempengaruhi variabel Kemiskinan dan 0,6243 lainnya merupakan variabel diluar penelitian.
2. Kabupaten/ kota yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kemiskinan adalah Kabupaten Klaten sedangkan kabupaten/ kota yang memiliki pengaruh terendah adalah Kota Tegal.
3. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Besarnya angka jumlah penduduk akan memberikan pengaruh terhadap kemiskinan. Sehingga di setiap jumlah penduduk mengalami kenaikan maka akan menurunkan kemiskinan.

4. Variabel PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. sehingga di setiap kenaikan PDRB akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
5. Variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga di setiap angka harapan hidup mengalami kenaikan maka kemiskinan akan menurun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk mengembangkan mekanisme pengaturan tenaga kerja yang efisien, seperti menyediakan informasi lowongan pekerjaan bagi para pencari pekerjaan.
2. Pemerintah harus meningkatkan sektor-sektor sumber penerimaan daerah khususnya sumber-sumber yang dapat berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Diharapkan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesehatan masyarakat, baik dari sarana prasarana yang harus ditingkatkan maupun kualitas dan pelayanan yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Di samping itu perlu penekanan biaya berobat bagi masyarakat kurang mampu sehingga harapannya kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dapat merata dan dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

C. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Penelitian hanya terdapat 3 variabel dependen antara lain Jumlah Penduduk, Produk Domestik, Regional Bruto, dan Angka Harapan Hidup. Sehingga masih banyak variabel lain yang ,ungkin berpengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan.
2. Periode penelitian ini hanya berjangka 8 tahun dari tahun 2010-2017, sehinga memungkinkan kurang representatif dalam hasil penelitiannya.
3. Objek dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel pada Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil yang diperoleh tidak mewakili hasil perhitungan pengaruh kemiskinan yang lebih luas seperti mewakili pengaruh seluruh Pulau Jawa atau nasional.

Daftar Pustaka

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 4(2), 265-283.
- Alhudori, M. (2017). PENGARUH IPM, PDRB DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAMBI. *Jurnal of Economics and Business*, 1(1), 113-124.
- Aziz, G. A., Rochaida, E., & Warsilan. (2016). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, 12(1), 29-48.
- Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). PENGARUH PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 167-180.
- Basuki, A. T. (2017). *Ekonometrika Dan Aplikasi Dalam Ekonomi*. Yogyakarta.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2015). *Electronic Data Processing*. Yogyakarta.
- Bintang, A. B., & Woyanti, N. (2018). PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH (2011-2015). *MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 33(1), 20-28.
- Dama, H. Y., Lapian, A. L., & Sumual, J. I. (2016). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549-561.
- Dewi, N. (2017). PENGARUH KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. *JOM Fekon*, 4(1), 870-882.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDIDIKAN DAN PERTUMBUHAN. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 100-114.
- Dores, E. (2014). PENGARUH ANGKA MELEK HURUF DAN ANGKA. *Journal of Economic and Economic Education*, 2(2), 126-133.

- Hakim, R. (2018). KOTEKSTUALISASI FIKIH GOLONGAN PENERIMA ZAKAT (ASNAF TSAMANIYAH) ZAKAT DAN RELEVANSINYA DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat*, 393-406.
- Hambarsari, D. P., & Inggit, K. (2016). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 257 - 282.
- Igbari, O. (2016). Poverty and Corruption in the New. *Open Access Library Journal*, 3, 2-8.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN RUMAH TANGGA DI SULAWESI UTARA. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7), 1-16.
- Khemili, H., & Belloumi, M. (2018). Social Security and Fighting Poverty in Tunisia. *Economies*, 6(12), 1-17.
- Puspita, D. W. (2015). ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI. *Journal of Economics and Policy*, 8(1), 100-107.
- Ramdani, M. (2015). DETERMINAN KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58-64.
- Rizzal, M. D., Saleh, M., & Jumiati, A. (2017). Determinan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Periode 2007-2015. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 164-168.
- Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). KEMISKINAN DAN PENGENTASANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-11.
- Suprianto, Pamungkas, B. D., & Zikriana, J. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 187-204.
- Titaley, E. (2015). Utilizing Sago to Reduce Poverty. *Open Access Library Journal*, 2, 1-6.
- Usman, U., & Diramita. (2018). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2), 9-15.

Zamzami. (2014). ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA*, 1(1), 39-47.

Badan pusat statistik. *Jawa tengah dalam angka 2010*.BPS jawa tengah 2010

Badan pusat statistik. *Jawa tengah dalam angka 2011*.BPS jawa tengah 2011

Badan pusat statistik. *Jawa tengah dalam angka 2012*.BPS jawa tengah 2012

Badan pusat statistik. *Jawa tengah dalam angka 2013*.BPS jawa tengah 2013

Badan pusat statistik. *Jawa tengah dalam angka 2014*.BPS jawa tengah 2014

Badan pusat statistik. *Jawa tengah dalam angka 2015*.BPS jawa tengah 2015

Badan pusat statistik. *Jawa tengah dalam angka 2016*.BPS jawa tengah 2016

Badan pusat statistik. *Jawa tengah dalam angka 2017*.BPS jawa tengah 2017

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Wilayah	Tahun	Kemiskinan (ribu jiwa)	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	PDRB (rupiah)	AHH (tahun)
Kab. Cilacap	2010	297200	1644990	75099089	72,45
Kab. Cilacap	2011	282000	1655668	78156818	72,55
Kab. Cilacap	2012	260900	1666192	79702237	72,65
Kab. Cilacap	2013	255700	1676098	81022670	72,75
Kab. Cilacap	2014	239800	1685631	83391500	72,80
Kab. Cilacap	2015	243500	1694726	88357606	73,00
Kab. Cilacap	2016	240200	1703390	92830362	73,11
Kab. Cilacap	2017	238300	1711627	95103846	73,24
Kab. Banyumas	2010	314100	1557480	23016943	72,67
Kab. Banyumas	2011	328500	1574002	24538595	72,74
Kab. Banyumas	2012	303900	1589930	25982158	72,82
Kab. Banyumas	2013	296800	1605585	27793138	72,89
Kab. Banyumas	2014	283500	1620772	29367687	72,92
Kab. Banyumas	2015	285900	1635909	31164876	73,12
Kab. Banyumas	2016	283900	1650625	33051046	73,23
Kab. Banyumas	2017	283200	1665025	35147313	73,33
Kab. Purbalingga	2010	208900	850729	10858631	72,56
Kab. Purbalingga	2011	196000	860725	11474221	72,63
Kab. Purbalingga	2012	181300	870423	12138445	72,69
Kab. Purbalingga	2013	181100	879880	12778311	72,76
Kab. Purbalingga	2014	176000	889172	13397712	72,80
Kab. Purbalingga	2015	176500	898376	14130612	72,81
Kab. Purbalingga	2016	171800	907507	14806549	72,86
Kab. Purbalingga	2017	171900	916427	15564284	72,91
Kab. Banjarnegara	2010	166700	870528	9439359	73,09
Kab. Banjarnegara	2011	177300	877201	9952403	73,17
Kab. Banjarnegara	2012	164000	883710	10473363	73,25
Kab. Banjarnegara	2013	166800	889894	11043083	73,34
Kab. Banjarnegara	2014	159500	896038	11629845	73,39
Kab. Banjarnegara	2015	165400	901826	12266046	73,59
Kab. Banjarnegara	2016	158200	907410	12929657	73,69
Kab. Banjarnegara	2017	156800	912917	13630385	73,79
Kab. Kebumen	2010	263000	1161920	12311421	72,24

Kab. Kebumen	2011	279400	1166989	13068985	72,36
Kab. Kebumen	2012	258500	1171998	13707057	72,49
Kab. Kebumen	2013	251100	1176622	14333333	72,61
Kab. Kebumen	2014	242300	1180894	15163091	72,67
Kab. Kebumen	2015	241900	1184882	16115554	72,77
Kab. Kebumen	2016	235900	1188603	16916219	72,87
Kab. Kebumen	2017	233400	1193007	17743915	72,98
Kab. Purworejo	2010	115300	696607	12311421	73,45
Kab. Purworejo	2011	121900	699682	13068985	73,56
Kab. Purworejo	2012	112800	702678	13707057	73,66
Kab. Purworejo	2013	109000	705527	14333333	73,77
Kab. Purworejo	2014	102100	708006	15163091	73,83
Kab. Purworejo	2015	101200	710386	16115554	74,03
Kab. Purworejo	2016	99100	712686	16916219	74,14
Kab. Purworejo	2017	98600	714574	17743915	74,26
Kab. Wonosobo	2010	174700	756182	9005925	70,37
Kab. Wonosobo	2011	183000	760828	9489550	70,50
Kab. Wonosobo	2012	169300	765113	9935905	70,63
Kab. Wonosobo	2013	170100	769396	10333757	70,76
Kab. Wonosobo	2014	165.800	773391	10828168	70,82
Kab. Wonosobo	2015	166400	777122	11334080	71,02
Kab. Wonosobo	2016	160100	780793	11915998	71,16
Kab. Wonosobo	2017	159200	784207	12292804	71,30
Kab. Magelang	2010	167200	1183996	14363230	73,00
Kab. Magelang	2011	179600	1196895	15323039	73,07
Kab. Magelang	2012	166200	1209486	16071142	73,14
Kab. Magelang	2013	171000	1221673	17020755	73,21
Kab. Magelang	2014	160500	1233701	17936288	73,25
Kab. Magelang	2015	162400	1245496	18864651	73,27
Kab. Magelang	2016	158900	1257123	19876744	73,33
Kab. Magelang	2017	157200	1268396	20882801	73,39
Kab. Boyolali	2010	127800	932311	13721701	75,41
Kab. Boyolali	2011	139500	939020	14592026	75,46
Kab. Boyolali	2012	129100	945511	15369974	75,52
Kab. Boyolali	2013	126500	951809	16266498	75,58
Kab. Boyolali	2014	118600	957913	17148350	75,61
Kab. Boyolali	2015	120000	963690	18170383	75,63
Kab. Boyolali	2016	117000	969325	19132556	75,67
Kab. Boyolali	2017	116400	974579	20188699	75,72

Kab. Klaten	2010	197400	1131971	17002049	76,37
Kab. Klaten	2011	203100	1137973	18071350	76,42
Kab. Klaten	2012	187900	1143676	19102402	76,47
Kab. Klaten	2013	179500	1149002	20241429	76,52
Kab. Klaten	2014	168200	1154028	21424522	76,54
Kab. Klaten	2015	172300	1158795	22558976	76,55
Kab. Klaten	2016	168000	1163218	23717931	76,59
Kab. Klaten	2017	165000	1167401	24920302	76,62
Kab. Sukoharjo	2010	90200	825782	16357221	77,37
Kab. Sukoharjo	2011	92000	833915	17319638	77,40
Kab. Sukoharjo	2012	85100	841773	18342247	77,42
Kab. Sukoharjo	2013	84100	849392	19401889	77,44
Kab. Sukoharjo	2014	78900	856861	20449009	77,45
Kab. Sukoharjo	2015	79900	864207	21612078	77,46
Kab. Sukoharjo	2016	78900	871397	22845982	77,46
Kab. Sukoharjo	2017	76700	878374	24152939	77,49
Kab. Wonogiri	2010	145500	930486	13310571	75,58
Kab. Wonogiri	2011	146400	934616	13786711	75,65
Kab. Wonogiri	2012	135400	938704	14605088	75,72
Kab. Wonogiri	2013	132200	942430	15303280	75,80
Kab. Wonogiri	2014	123800	945682	16107795	75,84
Kab. Wonogiri	2015	123000	949017	16977198	75,86
Kab. Wonogiri	2016	124800	951975	17865345	75,88
Kab. Wonogiri	2017	123000	954706	18788397	76,00
Kab. Karanganyar	2010	113800	814803	16393788	76,61
Kab. Karanganyar	2011	124500	823511	17205063	76,64
Kab. Karanganyar	2012	115200	831891	18219456	76,67
Kab. Karanganyar	2013	114400	840199	19256516	76,70
Kab. Karanganyar	2014	107300	848326	20262444	76,71
Kab. Karanganyar	2015	106400	856198	21286287	77,11
Kab. Karanganyar	2016	107700	864021	22428793	77,11
Kab. Karanganyar	2017	106800	871596	23665952	77,31
Kab. Sragen	2010	149700	859780	15832557	75,05
Kab. Sragen	2011	154300	863977	16870231	75,13
Kab. Sragen	2012	142800	868090	17902104	75,20
Kab. Sragen	2013	139000	871991	19102181	75,27
Kab. Sragen	2014	130300	875615	20169824	75,31
Kab. Sragen	2015	130400	879027	21390871	75,41
Kab. Sragen	2016	126800	882090	22618321	75,43

Kab. Sragen	2017	124000	885122	23933252	75,55
Kab. Grobogan	2010	233700	1311107	12766021	73,80
Kab. Grobogan	2011	227800	1319822	13172711	73,87
Kab. Grobogan	2012	210800	1328183	13842047	73,95
Kab. Grobogan	2013	199000	1336317	14474728	74,03
Kab. Grobogan	2014	186500	1343985	15064456	74,07
Kab. Grobogan	2015	184500	1351429	15962619	74,27
Kab. Grobogan	2016	184100	1358404	16674629	74,37
Kab. Grobogan	2017	181000	1365207	17617254	74,46
Kab. Blora	2010	134900	831228	10149079	73,51
Kab. Blora	2011	134900	835785	10597723	73,60
Kab. Blora	2012	124800	840193	11116865	73,70
Kab. Blora	2013	123800	844325	11712504	73,79
Kab. Blora	2014	116000	848378	12227201	73,84
Kab. Blora	2015	115000	852108	12882587	73,85
Kab. Blora	2016	113900	855573	15913432	73,88
Kab. Blora	2017	111900	858865	16843360	73,99
Kab. Rembang	2010	138500	592481	8373546	73,97
Kab. Rembang	2011	140400	598087	8808302	74,03
Kab. Rembang	2012	129900	603573	9277163	74,09
Kab. Rembang	2013	128000	608891	9780750	74,16
Kab. Rembang	2014	120000	614065	10284274	74,19
Kab. Rembang	2015	119100	619173	10850269	74,22
Kab. Rembang	2016	115500	624096	11418008	74,27
Kab. Rembang	2017	115200	628922	12123468	74,32
Kab. Pati	2010	172400	1193202	18782546	75,23
Kab. Pati	2011	175100	1201801	19893325	75,29
Kab. Pati	2012	162000	1210001	21072328	75,34
Kab. Pati	2013	157900	1217930	22329693	75,40
Kab. Pati	2014	148100	1225603	23365213	75,43
Kab. Pati	2015	147100	1232889	24770325	75,63
Kab. Pati	2016	144200	1239989	26121955	75,69
Kab. Pati	2017	141700	1246691	27532168	75,80
Kab. Kudus	2010	70200	779076	52933496	76,33
Kab. Kudus	2011	73600	789875	55175794	76,35
Kab. Kudus	2012	68100	800403	57440810	76,37
Kab. Kudus	2013	70100	810893	59944556	76,39
Kab. Kudus	2014	65800	821109	62600680	76,40
Kab. Kudus	2015	64100	831303	65029937	76,41

Kab. Kudus	2016	64200	841499	66669085	76,43
Kab. Kudus	2017	64400	851478	68649053	76,44
Kab. Jepara	2010	111800	1099710	13347321	75,58
Kab. Jepara	2011	113300	1117784	14004325	75,59
Kab. Jepara	2012	104800	1135628	14824995	75,61
Kab. Jepara	2013	106900	1153321	15623738	75,63
Kab. Jepara	2014	100500	1170785	16374715	75,64
Kab. Jepara	2015	100600	1188289	17210365	75,65
Kab. Jepara	2016	100300	1205800	18074134	75,67
Kab. Jepara	2017	99000	1223198	19001040	75,68
Kab. Demak	2010	198800	1057695	11647735	75,05
Kab. Demak	2011	192500	1070307	12275702	75,09
Kab. Demak	2012	178100	1082498	12823227	75,12
Kab. Demak	2013	172500	1094495	13499226	75,16
Kab. Demak	2014	162000	1106209	14078419	75,18
Kab. Demak	2015	160900	1117905	14912999	75,21
Kab. Demak	2016	158800	1129298	15666347	75,27
Kab. Demak	2017	152600	1140675	16537579	75,27
Kab. Semarang	2010	97900	932702	21572136	75,40
Kab. Semarang	2011	96000	946774	22925456	75,42
Kab. Semarang	2012	88800	960497	24306718	75,45
Kab. Semarang	2013	83200	947115	25758121	75,48
Kab. Semarang	2014	79800	987597	27264112	75,50
Kab. Semarang	2015	81200	1000887	28768327	75,52
Kab. Semarang	2016	80700	1014198	30283032	75,54
Kab. Semarang	2017	79700	1027489	31939250	75,57
Kab. Temanggung	2010	95300	709913	9710199	75,17
Kab. Temanggung	2011	94900	717402	10301569	75,22
Kab. Temanggung	2012	92800	724688	10740983	75,26
Kab. Temanggung	2013	91100	731927	11299342	75,31
Kab. Temanggung	2014	85500	738881	11867679	75,34
Kab. Temanggung	2015	87500	745825	12489394	75,35
Kab. Temanggung	2016	87100	752486	13110745	75,39
Kab. Temanggung	2017	86800	759128	13724464	75,42
Kab. Kendal	2010	130400	901985	18798278	73,92
Kab. Kendal	2011	128600	910494	20032434	73,98
Kab. Kendal	2012	119000	918798	21075717	74,05
Kab. Kendal	2013	117700	926791	22386123	74,11
Kab. Kendal	2014	110500	934627	23536834	74,14

Kab. Kendal	2015	109300	942283	24762325	74,15
Kab. Kendal	2016	107800	949682	26131137	74,20
Kab. Kendal	2017	106100	957024	27586097	74,24
Kab. Batang	2010	103600	708088	9447328	74,22
Kab. Batang	2011	95300	715506	10025044	74,28
Kab. Batang	2012	88200	722596	10488456	74,33
Kab. Batang	2013	87500	729591	11104696	74,38
Kab. Batang	2014	82100	736497	11693897	74,40
Kab. Batang	2015	83500	743090	12328239	74,42
Kab. Batang	2016	82600	749720	12942691	74,46
Kab. Batang	2017	81500	756079	13627279	74,50
Kab. Pekalongan	2010	136600	840212	10254315	73,08
Kab. Pekalongan	2011	125900	424525	10834201	73,15
Kab. Pekalongan	2012	116500	854396	11354849	73,23
Kab. Pekalongan	2013	110500	861125	12034805	73,30
Kab. Pekalongan	2014	109300	867701	12630368	73,33
Kab. Pekalongan	2015	112100	873986	13234564	73,35
Kab. Pekalongan	2016	113300	880092	13917701	73,41
Kab. Pekalongan	2017	111600	886197	14652178	73,46
Kab. Pemalang	2010	251800	1263584	11282196	72,26
Kab. Pemalang	2011	261200	1269219	11847199	72,37
Kab. Pemalang	2012	241700	1274606	12477235	72,48
Kab. Pemalang	2013	246800	1279581	13172063	72,59
Kab. Pemalang	2014	237000	1284171	13898669	72,64
Kab. Pemalang	2015	235500	1288577	14673696	72,77
Kab. Pemalang	2016	227100	1292609	15463800	72,87
Kab. Pemalang	2017	225000	1296281	16297654	72,98
Kab. Tegal	2010	182500	1397193	15106509	70,32
Kab. Tegal	2011	161100	1403427	16071820	70,46
Kab. Tegal	2012	149000	1409424	16912249	70,59
Kab. Tegal	2013	149800	1414983	18050291	70,73
Kab. Tegal	2014	140300	1420106	18958841	70,80
Kab. Tegal	2015	143500	1424891	19999475	70,90
Kab. Tegal	2016	144200	1429386	21182917	71,02
Kab. Tegal	2017	141800	1433515	22322100	71,14
Kab. Brebes	2010	398700	1736782	20158107	67,29
Kab. Brebes	2011	394400	1746613	21498422	67,46
Kab. Brebes	2012	364900	1756018	22482262	67,63
Kab. Brebes	2013	367900	1764982	23812056	67,81

Kab. Brebes	2014	355100	1773373	25074171	67,90
Kab. Brebes	2015	352000	1781379	26572834	68,20
Kab. Brebes	2016	348000	1788880	27921986	68,41
Kab. Brebes	2017	343500	1796004	29450228	68,61
Kota Magelang	2010	12400	118424	4010718	76,39
Kota Magelang	2011	13100	118003	4255662	76,44
Kota Magelang	2012	12100	119416	4484268	76,49
Kota Magelang	2013	11800	119879	4755092	76,54
Kota Magelang	2014	11000	120438	4992112	76,57
Kota Magelang	2015	10900	120792	5247341	76,58
Kota Magelang	2016	10600	121112	5518684	76,62
Kota Magelang	2017	10600	121474	5804311	76,66
Kota Surakarta	2010	69800	500211	21469551	76,85
Kota Surakarta	2011	64500	502873	22848439	76,89
Kota Surakarta	2012	59700	505401	24123781	76,93
Kota Surakarta	2013	59700	507798	25631681	76,97
Kota Surakarta	2014	55900	510105	26984358	76,99
Kota Surakarta	2015	55700	512226	28453493	77,00
Kota Surakarta	2016	55900	514171	29966373	77,03
Kota Surakarta	2017	54900	516102	31562980	77,06
Kota Salatiga	2010	14200	170692	5845475	76,48
Kota Salatiga	2011	13300	173377	6230219	76,50
Kota Salatiga	2012	12300	175989	6574907	76,52
Kota Salatiga	2013	11500	178719	6989045	76,53
Kota Salatiga	2014	10800	181304	7378042	76,53
Kota Salatiga	2015	10600	183815	7759181	76,83
Kota Salatiga	2016	9700	186420	8163940	76,87
Kota Salatiga	2017	9600	188928	8589009	76,98
Kota Semarang	2010	79700	1560013	80824099	77,17
Kota Semarang	2011	88500	1588511	86142966	77,17
Kota Semarang	2012	81900	1616494	91282029	77,18
Kota Semarang	2013	86700	1644374	96985402	77,18
Kota Semarang	2014	84700	1672992	103109874	77,18
Kota Semarang	2015	84300	1701114	109110689	77,20
Kota Semarang	2016	83600	1729083	115485429	77,21
Kota Semarang	2017	80900	1757686	122000440	77,21
Kota Pekalongan	2010	26400	282018	4624260	73,91
Kota Pekalongan	2011	28300	285000	4878332	73,96
Kota Pekalongan	2012	26800	288001	5151813	74,01

Kota Pekalongan	2013	24100	290903	5456196	74,06
Kota Pekalongan	2014	23600	293718	5755282	74,09
Kota Pekalongan	2015	24100	296404	6043095	74,11
Kota Pekalongan	2016	23600	299222	6367272	74,15
Kota Pekalongan	2017	22500	301870	6706278	74,19
Kota Tegal	2010	25700	240005	6895713	73,83
Kota Tegal	2011	25900	241326	7341540	73,91
Kota Tegal	2012	24000	242714	7650479	73,98
Kota Tegal	2013	21600	243901	8084175	74,06
Kota Tegal	2014	20900	244978	8491325	74,10
Kota Tegal	2015	20300	246119	8953879	74,12
Kota Tegal	2016	20300	247212	9440530	74,18
Kota Tegal	2017	20100	248094	9955592	74,23

LAMPIRAN 2

FIXED EFFECT MODEL

Dependent Variable: KEMISKINAN?

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/15/19 Time: 18:59

Sample: 2010 2017

Included observations: 8

Cross-sections included: 35

Total pool (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3068062.	203543.5	15.07325	0.0000
JP?	-0.031289	0.015524	-2.015545	0.0450
PDRB?	-0.000365	0.000163	-2.234305	0.0264
AHH?	-38896.96	2776.711	-14.00829	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_CILACAP--C	104883.0			
_BANYUMAS--C	128485.4			
_PURBALINGGA--C	-22807.57			
_BANJARNEGARA--C	-16057.06			
_KEBUMEN--C	49781.05			
_PURWOREJO--C	-60959.01			
_WONOSOBO--C	-116796.5			
_MAGELANG--C	-10334.93			
_BOYOLALI--C	31942.13			
_KLATEN--C	131752.8			
_SUKOHARJO--C	61206.02			
_WONOGIRI--C	47056.91			
_KARANGANYAR--C	67123.13			
_SRAGEN--C	32326.66			
_GROBOGAN--C	62590.85			
_BLORA--C	-45636.50			
_REMBANG--C	-34966.64			
_PATI--C	70397.10			
_KUDUS--C	18663.12			
_JEPARA--C	20631.67			
_DEMAK--C	67302.06			
_SEMARANG--C	-5720.913			
_TEMANGGUNG--C	-21447.82			
_KENDAL--C	-32149.84			
_BATANG--C	-60002.44			
_PEKALONGAN--C	-70484.33			
_PEMALANG--C	42464.03			
_TEGAL--C	-113661.4			
_BREBES--C	3452.009			
_KMAGELANG--C	-73934.88			
_KSURAKARTA--C	10704.97			
_KSALATIGA--C	-66659.27			
_KSEMARANG--C	106737.9			
_KPEKALONGAN--C	-151232.9			
_KTEGAL--C	-154648.7			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993757	Mean dependent var	136584.3
Adjusted R-squared	0.992803	S.D. dependent var	78897.89
S.E. of regression	6693.488	Akaike info criterion	20.58123
Sum squared resid	1.08E+10	Schwarz criterion	21.07453
Log likelihood	-2843.373	Hannan-Quinn criter.	20.77910
F-statistic	1041.138	Durbin-Watson stat	1.128348
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 3

RANDOM EFFECT MODEL

Dependent Variable: KEMISKINAN?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 02/15/19 Time: 19:00
Sample: 2010 2017
Included observations: 8
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 280
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2638360.	152224.1	17.33208	0.0000
JP?	0.029253	0.011455	2.553726	0.0112
PDRB?	-0.000633	0.000149	-4.237831	0.0000
AHH?	-33818.19	2030.794	-16.65269	0.0000
Random Effects (Cross)				
_CILACAP--C	85188.02			
_BANYUMAS--C	97226.83			
_PURBALINGGA--C	-12549.83			
_BANJARNEGARA--C	-10132.08			
_KEBUMEN--C	43104.59			
_PURWOREJO--C	-44812.08			
_WONOSOBO--C	-90163.85			
_MAGELANG--C	-21928.16			
_BOYOLALI--C	24428.06			
_KLATEN--C	108278.2			
_SUKOHARJO--C	51125.97			
_WONOGIRI--C	38768.29			
_KARANGANYAR--C	60417.42			
_SRAGEN--C	31889.91			
_GROBOGAN--C	38673.60			
_BLORA--C	-38225.75			
_REMBANG--C	-16104.32			
_PATI--C	48767.43			
_KUDUS--C	27224.82			
_JEPARA--C	177.7450			
_DEMAK--C	52128.14			
_SEMARANG--C	-11374.75			
_TEMANGGUNG--C	-15522.13			
_KENDAL--C	-28791.36			
_BATANG--C	-49082.37			
_PEKALONGAN--C	-58511.38			
_PEMALANG--C	29296.21			
_TEGAL--C	-123459.2			
_BREBES--C	-12155.32			
_KMAGELANG--C	-38712.38			
_KSURAKARTA--C	25664.60			
_KSALATIGA--C	-35069.94			
_KSEMARANG--C	70589.05			
_KPEKALONGAN--C	-113304.3			
_KTEGAL--C	-113049.6			

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		34194.05	0.9631
Idiosyncratic random		6693.488	0.0369
Weighted Statistics			
R-squared	0.563944	Mean dependent var	9430.184
Adjusted R-squared	0.559204	S.D. dependent var	11623.88
S.E. of regression	7717.380	Sum squared resid	1.64E+10
F-statistic	118.9821	Durbin-Watson stat	0.729487
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.449601	Mean dependent var	136584.3
Sum squared resid	9.56E+11	Durbin-Watson stat	0.012545

LAMPIRAN 4

COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: KEMISKINAN?
Method: Pooled Least Squares
Date: 02/17/19 Time: 10:29
Sample: 2010 2017
Included observations: 8
Cross-sections included: 35
Total pool (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	957980.8	94352.73	10.15319	0.0000
JP?	0.153515	0.007211	21.29002	0.0000
PDRB?	-0.000963	0.000135	-7.153998	0.0000
AHH?	-12725.89	1232.001	-10.32945	0.0000
R-squared	0.816228	Mean dependent var	136584.3	
Adjusted R-squared	0.814231	S.D. dependent var	78897.89	
S.E. of regression	34005.74	Akaike info criterion	23.72063	
Sum squared resid	3.19E+11	Schwarz criterion	23.77255	
Log likelihood	-3316.888	Hannan-Quinn criter.	23.74146	
F-statistic	408.6212	Durbin-Watson stat	0.069394	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 5

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: PANEL

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	202.404331	(34,242)	0.0000
Cross-section Chi-square	947.030404	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN?

Method: Panel Least Squares

Date: 02/15/19 Time: 19:00

Sample: 2010 2017

Included observations: 8

Cross-sections included: 35

Total pool (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	957980.8	94352.73	10.15319	0.0000
JP?	0.153515	0.007211	21.29002	0.0000
PDRB?	-0.000963	0.000135	-7.153998	0.0000
AHH?	-12725.89	1232.001	-10.32945	0.0000

R-squared	0.816228	Mean dependent var	136584.3
Adjusted R-squared	0.814231	S.D. dependent var	78897.89
S.E. of regression	34005.74	Akaike info criterion	23.72063
Sum squared resid	3.19E+11	Schwarz criterion	23.77255
Log likelihood	-3316.888	Hannan-Quinn criter.	23.74146
F-statistic	408.6212	Durbin-Watson stat	0.069394
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 6

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: PANEL

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	93.896697	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
JP?	-0.031289	0.029253	0.000110	0.0000
PDRB?	-0.000365	-0.000633	0.000000	0.0001
	-			
AHH?	38896.96168	- 3585999.0894	35	0.0073
	3	33818.187751		

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN?

Method: Panel Least Squares

Date: 02/15/19 Time: 19:01

Sample: 2010 2017

Included observations: 8

Cross-sections included: 35

Total pool (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3068062.	203543.5	15.07325	0.0000
JP?	-0.031289	0.015524	-2.015545	0.0450
PDRB?	-0.000365	0.000163	-2.234305	0.0264
AHH?	-38896.96	2776.711	-14.00829	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993757	Mean dependent var	136584.3
Adjusted R-squared	0.992803	S.D. dependent var	78897.89
S.E. of regression	6693.488	Akaike info criterion	20.58123
Sum squared resid	1.08E+10	Schwarz criterion	21.07453
Log likelihood	-2843.373	Hannan-Quinn criter.	20.77910
F-statistic	1041.138	Durbin-Watson stat	1.128348
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 7

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/15/19 Time: 19:29
 Sample: 2010 2017
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 280
 White period standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	100746.1	83913.00	1.200602	0.2309
JP	-0.001503	0.004293	-0.350153	0.7265
PDRB	0.0000316	0.000048	0.658070	0.5110
AHH	-12.70785	10.79421	-1.177284	0.2401
R-squared	0.054071	Mean dependent var		5454.500
Adjusted R-squared	0.043789	S.D. dependent var		9907.654
S.E. of regression	9688.302	Akaike info criterion		21.20941
Sum squared resid	2.59E+10	Schwarz criterion		21.26133
Log likelihood	-2965.317	Hannan-Quinn criter.		21.23024
F-statistic	5.258892	Durbin-Watson stat		1.516881
Prob(F-statistic)	0.001526			

LAMPIRAN 8

UJI MULTIKOLINEARITAS

	K	JP	PDRB	AHH
K	1	0.78781673287194 49	0.1261416775384 64	- 0.6622733523523 257
JP	0.7878167328719 449	1	0.5327964924008 577	- 0.3940849557122 911
PDRB	0.1261416775384 64	0.53279649240085 77	1	0.1560058777970 88
AHH	- 0.6622733523523 257	- 0.39408495571229 11	0.1560058777970 88	1